

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8 /SEOJK.03/2018

TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841) selanjutnya disingkat POJK RBB, perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, BUS dan UUS perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan asas perbankan yang sehat, serta prinsip syariah. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis, dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan serta pengembangan usaha BUS dan UUS.
2. Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis untuk UUS disusun sebagai bagian tersendiri yang disajikan sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bank umum yang memiliki UUS.

II. CAKUPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

Sesuai POJK RBB, Rencana Bisnis BUS dan Rencana Bisnis UUS paling sedikit mencakup:

1. ringkasan eksekutif;
2. kebijakan dan strategi manajemen;
3. penerapan manajemen risiko dan kinerja BUS dan UUS saat ini;
4. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
5. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
6. rencana pendanaan;
7. rencana penanaman dana;
8. rencana penyertaan modal;
9. rencana permodalan;
10. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
11. rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
12. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
13. informasi lainnya.

Khusus untuk rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 8 hanya berlaku bagi BUS.

Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bersifat minimum sehingga BUS dan UUS dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada romawi I.

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta dana pihak ketiga dan rasio keuangan. Selain itu, ringkasan eksekutif juga memuat target usaha BUS dan UUS dalam jangka pendek (1 tahun) sampai dengan jangka menengah (3 tahun).

Ringkasan eksekutif paling sedikit mencakup:

a. Visi dan Misi BUS dan UUS

Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan BUS dan UUS pada masa mendatang.

b. Arah Kebijakan BUS dan UUS

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan BUS dan UUS baik jangka pendek maupun jangka menengah.

- c. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh BUS dan UUS
Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh BUS dan UUS untuk mencapai visi dan misi BUS dan UUS sesuai dengan arah kebijakan BUS dan UUS ke depan.
- d. Indikator Keuangan Utama
Bagian ini antara lain memuat posisi aktual (per posisi bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) maupun proyeksi. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis bagi BUS tahun X sebagai berikut:

Indikator	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
		Des X-1	Tahun X				Des X+ 1	Des X+2
			Maret	Juni	Sep	Des		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)								
Rasio Modal Inti terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)								
Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR								
Rasio Modal Inti terhadap Total Aset								
<i>Return on Asset (ROA)</i>								
<i>Return on Equity (ROE)</i>								
<i>Net Imbalan (NI)</i>								
<i>Net Operating Margin (NOM)</i>								
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)								
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif								
Rasio <i>Non Performing Financing (NPF) Gross</i>								
Rasio <i>NPF Nett</i>								
Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan								
Rasio Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Pembiayaan								
<i>Short Term Mismatch (STM)</i>								
Rasio Deposan Inti (RDI)								
Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek								
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis bagi UUS tahun X sebagai berikut:

Indikator	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
		Des X-1	Tahun X				Des X+ 1	Des X+2
			Maret	Juni	Sep	Des		
<i>Return on Asset (ROA)</i>								
<i>Net Imbalan (NI)</i>								
<i>Net Operating Margin (NOM)</i>								
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)								
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif								
<i>Rasio Non Performing Financing (NPF) Gross</i>								
<i>Rasio NPF Nett</i>								
Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif								
Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan								
Rasio Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Pembiayaan								
<i>Short Term Mismatch (STM)</i>								
Rasio Deposan Inti (RDI)								
Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek								
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

e. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Bagian ini menguraikan target atau fokus kegiatan usaha BUS dan UUS baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi BUS dan UUS disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang digunakan, dan strategi untuk mencapai target.

Target jangka pendek, misalnya berupa target penurunan tingkat NPF, peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. Sementara itu target jangka menengah, misalnya target pengembangan perbankan syariah dan target penerapan tata kelola.

2. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen selama 1 (satu) tahun ke depan, yang paling sedikit memuat:

- a. analisis posisi BUS dan UUS dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi BUS dan UUS baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami BUS dan UUS. Dalam melakukan analisis posisi, BUS dan UUS menggunakan pendekatan tertentu, paling sedikit berupa analisis *strengths, weaknesses, opportunities, dan threats* (SWOT);
- b. kebijakan manajemen (*policy statements*), meliputi informasi umum kebijakan BUS dan UUS yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BUS dan UUS pada waktu yang akan datang;
- c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko BUS dan UUS dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;
- d. strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha BUS dan UUS yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal; dan
- e. strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (*remuneration policies*). Kebijakan remunerasi paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pegawai BUS serta kepada Direktur UUS, DPS, dan pegawai UUS.

3. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja BUS dan UUS Saat Ini

Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi BUS dan UUS pada saat penyusunan Rencana Bisnis dan menyoroti hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau

permasalahan yang dihadapi serta hasil yang telah dicapai BUS dan UUS.

Bagian ini paling sedikit memuat uraian mengenai:

- a. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko

Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis BUS dan UUS.

Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian BUS dan UUS mengenai tingkat dan tren untuk seluruh risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS.

Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi mengenai efektivitas dan hasil penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Selain itu, dalam uraian ini termasuk pula kewajiban penyampaian rencana kerja fungsi kepatuhan untuk 1 (satu) tahun ke depan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- b. Penerapan Tata Kelola

Uraian mengenai penilaian penerapan tata kelola mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi BUS dan UUS.

- c. Kinerja Keuangan, khususnya Permodalan (*Capital*) dan Rentabilitas (*Earnings*)

Uraian mengenai kinerja keuangan BUS dan UUS termasuk hasil pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dalam rangka memperbaiki kinerja BUS dan UUS (jika ada) sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan BUS dan UUS.

Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup kecukupan dan komposisi, serta kemampuan permodalan BUS untuk mengantisipasi risiko yang timbul dari aset bermasalah, kemampuan BUS untuk menambah modal dari laba operasional, kemampuan permodalan BUS untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan BUS.

Uraian mengenai kinerja rentabilitas BUS dan UUS mencakup paling sedikit pencapaian tingkat *return* yang diharapkan, proporsi aset produktif yang menghasilkan pendapatan terhadap aset, dan tingkat efisiensi.

- d. Realisasi Pemberian Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Uraian mengenai realisasi pemberian pembiayaan mencerminkan peranan BUS dan UUS dalam mendukung perkembangan UMKM.

Pengelompokan UMKM mengacu pada kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

- e. Penerapan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Uraian mengenai langkah yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan/atau aktivitas yang dilakukan oleh BUS dan UUS telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

4. Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan

Bagian ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan dan pelaksanaan fungsi sosial BUS dan UUS posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud.

Asumsi makro antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antarbank, pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah,

serta tingkat imbalan pembiayaan dan dana pihak ketiga yang digunakan dalam menyusun Rencana Bisnis.

Proyeksi laporan keuangan bagi BUS disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran I.A : Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Lampiran I.B : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
- c. Lampiran I.C : Proyeksi Laba Rugi
- d. Lampiran I.D : Perhitungan Distribusi Bagi Hasil
- e. Lampiran I.E : Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- f. Lampiran I.F : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- g. Lampiran I.G : Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

Proyeksi laporan keuangan bagi UUS disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran II.A : Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Lampiran II.B : Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi
- c. Lampiran II.C : Proyeksi Laba Rugi
- d. Lampiran II.D : Perhitungan Distribusi Bagi Hasil
- e. Lampiran II.E : Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
- f. Lampiran II.F : Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- g. Lampiran II.G : Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

5. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos-Pos Tertentu Lainnya

Bagian ini memuat rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan, sebagai berikut:

a. Rasio Keuangan Pokok

Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

b. Pos-Pos Tertentu Lainnya

Proyeksi pos-pos tertentu lainnya meliputi proyeksi beberapa rasio terkait pembiayaan kepada UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS terhadap modal.

Proyeksi Rasio Keuangan Pokok dan Pos-Pos Tertentu Lainnya disusun dengan mengacu pada Lampiran I.H bagi BUS dan Lampiran II.H bagi UUS.

6. Rencana Pendanaan

Bagian ini mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana pendanaan.

Rencana pendanaan bagi BUS disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran I.I : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
- b. Lampiran I.J : Rencana Penerbitan Surat Berharga
- c. Lampiran I.K : Rencana Pendanaan Lainnya

Rencana pendanaan bagi UUS disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran II.I : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
- b. Lampiran II.J : Rencana Penerbitan Surat Berharga
- c. Lampiran II.K : Rencana Pendanaan Lainnya

7. Rencana Penanaman Dana

Bagian ini mencerminkan posisi penanaman dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penanaman dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang antara lain memberikan informasi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian pembiayaan, termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam rincian pemberian pembiayaan mencerminkan fokus pemberian pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan, dan/atau signifikansi pangsa pembiayaan maupun jumlah debitur.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BUS dan UUS untuk merealisasikan rencana penanaman dana.

Rencana penanaman dana bagi BUS disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran I.L : Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
- b. Lampiran I.M.1 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Inti
- c. Lampiran I.M.2 : Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu

- d. Lampiran I.M.3.a : Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi
- e. Lampiran I.M.3.b : Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan
- f. Lampiran I.M.3.c : Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Provinsi
- g. Lampiran I.M.3.d : Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad
- h. Lampiran I.M.4.a : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Sektor Ekonomi
- i. Lampiran I.M.4.b : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Jenis Penggunaan
- j. Lampiran I.M.4.c : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Provinsi (Lokasi Proyek/Debitur)
- k. Lampiran I.N : Rencana Penanaman Dana dalam Bentuk Surat Berharga
- l. Lampiran I.O : Rencana Penanaman Dana Lainnya

Rencana penanaman dana bagi UUS disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran II.L : Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
- b. Lampiran II.M.1 : Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Inti
- c. Lampiran II.M.2 : Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu
- d. Lampiran II.M.3.a: Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi
- e. Lampiran II.M.3.b: Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan
- f. Lampiran II.M.3.c: Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Provinsi
- g. Lampiran II.M.3.d: Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad
- h. Lampiran II.M.4.a: Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Sektor Ekonomi

- i. Lampiran II.M.4.b: Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Jenis Penggunaan
- j. Lampiran II.M.4.c: Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Provinsi (Lokasi Proyek/Debitur)
- k. Lampiran II.N : Rencana Penanaman Dana dalam Bentuk Surat Berharga
- l. Lampiran II.O : Rencana Penanaman Dana Lainnya

8. Rencana Penyertaan Modal

Bagian ini mencerminkan posisi penyertaan modal posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyertaan modal untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara triwulanan yang paling sedikit meliputi bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Rencana Penyertaan Modal disusun dengan mengacu pada Lampiran I.P.

9. Rencana Permodalan

Bagian ini paling sedikit meliputi:

- a. Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi BUS

Proyeksi KPMM paling sedikit meliputi proyeksi modal, proyeksi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPMM selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi Pemenuhan KPMM ini disusun dengan mengacu pada Lampiran I.Q.

- b. Rencana Perubahan Modal

Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun ke depan baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.

Termasuk dalam rencana perubahan modal untuk BUS adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing*

shareholders), rencana *Initial Public Offering* (IPO), *right issue*, penerbitan surat berharga yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, serta uraian mengenai rencana perubahan atau penggantian kepemilikan (jika ada).

Rencana perubahan modal untuk UUS adalah perubahan dana bersih yang ditempatkan bank umum yang memiliki UUS pada UUS setelah dikurangi dengan penempatan UUS pada bank umum yang memiliki UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai unit usaha syariah.

Rencana Perubahan Modal bagi BUS disusun dengan mengacu pada Lampiran I.R dan Rencana Perubahan Modal bagi UUS disusun dengan mengacu pada Lampiran II.P.

10. Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Bagian ini menguraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling sedikit selama 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:
 - a. Rencana Pengembangan Organisasi
Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan kemampuan, ukuran, dan kompleksitas usaha BUS dan UUS.
 - b. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara lain mencakup pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan sistem akuntansi, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk rencana pengembangan tersebut.
 - c. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rencana pengembangan SDM antara lain mencakup rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

Rencana pengembangan SDM bagi BUS disusun dengan mengacu pada:

- 1) Lampiran I.S.1 : Kondisi dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
- 2) Lampiran I.S.2 : Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan SDM bagi UUS disusun dengan mengacu pada:

- 1) Lampiran II.Q.1: Kondisi dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia
- 2) Lampiran II.Q.2: Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Rencana pemanfaatan tenaga kerja asing antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

Rencana penggunaan tenaga alih daya (*outsourcing*) antara lain mencakup jumlah maupun bidang kerja penugasan sebagaimana diatur dalam POJK RBB.

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) bagi BUS disusun dengan mengacu pada Lampiran I.T serta Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) bagi UUS disusun dengan mengacu pada Lampiran II.R.

11. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang dicantumkan pada Rencana Bisnis adalah produk dan/atau aktivitas baru yang belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas baru bagi BUS dan UUS. Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru paling sedikit untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru diuraikan pula rencana penelitian dan pengembangan produk (*product research and development*) yang akan dilakukan BUS dan UUS. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru untuk BUS disusun dengan mengacu pada Lampiran I.U dan Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru untuk UUS disusun dengan mengacu pada Lampiran II.S.

12. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan yang meliputi kantor wilayah, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor fungsional, kegiatan pelayanan kas, layanan syariah bank, layanan syariah, dan/atau kantor di luar negeri untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Informasi yang dimuat dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor antara lain meliputi informasi mengenai kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi/biaya, lokasi, dan keterangan lainnya.

Informasi mengenai lokasi untuk setiap jenis kantor, paling sedikit mencantumkan lokasi kabupaten/kota secara jelas, dan untuk lokasi kantor yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling sedikit mencantumkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi. Khusus untuk kantor yang berlokasi di luar negeri, mencantumkan nama kota dan negara.

Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor bagi BUS disusun dengan mengacu pada Lampiran I.V dan Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor bagi UUS disusun dengan mengacu pada Lampiran II.T.

13. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai dengan angka 12, antara lain langkah-langkah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah termasuk agunan yang diambil alih (AYDA), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional BUS dan UUS, *linkage program*, dan/atau pengembangan pelayanan BUS dan UUS.

Pengembangan pelayanan BUS dan UUS mencakup antara lain informasi rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah, rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah, rencana upaya perlindungan nasabah, dan rencana penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Cakupan informasi yang dimuat dalam rencana upaya perlindungan nasabah meliputi antara lain rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, dan rencana peningkatan sistem pelayanan pengaduan nasabah.

Cakupan informasi yang dimuat dalam rencana penyelenggaraan Laku Pandai mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Pengertian AYDA mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS.

III. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai POJK RBB, Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan BUS dan UUS secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Laporan Realisasi Rencana Bisnis paling sedikit mencakup:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, prioritas pencapaian Rencana Bisnis, dan perbandingan antara rencana dengan realisasinya;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi;
 - c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d, antara lain meliputi laporan realisasi perubahan jaringan kantor, laporan realisasi tenaga kerja asing dan tenaga alih daya (*outsourcing*), serta laporan realisasi *linkage program* (jika ada).

Laporan Realisasi Rencana Bisnis bagi BUS secara umum disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran I.W.1 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis
- b. Lampiran I.W.2 : Laporan Realisasi Rasio Keuangan Pokok dan Pos-pos Tertentu Lainnya
- c. Lampiran I.W.3 : Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
- d. Lampiran I.W.4 : Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, Hasil Pelaksanaan Kewajiban Alih Pengetahuan, dan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)
- e. Lampiran I.W.5 : Laporan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
- f. Lampiran I.W.6 : Laporan Realisasi *Linkage Program*

Laporan Realisasi Rencana Bisnis bagi UUS secara umum disusun dengan mengacu pada:

- a. Lampiran II.U.1 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis
 - b. Lampiran II.U.2 : Laporan Realisasi Rasio Keuangan Pokok dan Pos-pos Tertentu Lainnya
 - c. Lampiran II.U.3 : Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
 - d. Lampiran II.U.4 : Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, Hasil Pelaksanaan Kewajiban Alih Pengetahuan, dan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)
 - e. Lampiran II.U.5 : Laporan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
 - f. Lampiran II.U.6 : Laporan Realisasi *Linkage Program*
2. Sesuai POJK RBB, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai:
- a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
 - b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUS dan UUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan, rentabilitas, tata

kelola yang baik, serta profil risiko BUS dan UUS terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas; dan

- c. upaya memperbaiki kinerja BUS dan UUS, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana pada huruf b terjadi penurunan kinerja.

Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf c, dapat dilengkapi dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang memengaruhi operasional BUS dan UUS.

Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris, BUS dan UUS harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi BUS disusun dengan mengacu pada Lampiran I.X dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi UUS disusun dengan mengacu pada Lampiran II.V.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/32/DPbS tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2018
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN,
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8 /SEOJK.03/2018

TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.A	: Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)	1
Lampiran I.B	: Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi	3
Lampiran I.C	: Proyeksi Laba Rugi	5
Lampiran I.D	: Perhitungan Distribusi Bagi Hasil	9
Lampiran I.E	: Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10
Lampiran I.F	: Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11
Lampiran I.G	: Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan	12
Lampiran I.H	: Proyeksi Rasio Keuangan Pokok dan Pos - Pos Tertentu Lainnya	13
Lampiran I.I	: Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	19
Lampiran I.J	: Rencana Penerbitan Surat Berharga	20
Lampiran I.K	: Rencana Pendanaan Lainnya	21
Lampiran I.L	: Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	22
Lampiran I.M	: 1. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Inti	23
	2. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu	24
	3. a. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	25
	b. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan	27
	c. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Provinsi	28
	d. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad	29
	4. a. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi	30
	b. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Jenis Penggunaan	31
	c. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Provinsi (Lokasi Proyek/Debitur)	32
Lampiran I.N	: Rencana Penanaman Dana dalam Bentuk Surat Berharga	34
Lampiran I.O	: Rencana Penanaman Dana Lainnya	35
Lampiran I.P	: Rencana Penyertaan Modal	36
Lampiran I.Q	: Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal	37

	Minimum (KPMM)	
Lampiran I.R	: Rencana Perubahan Modal	39
Lampiran I.S	: 1. Kondisi dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia	40
	2. Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	41
Lampiran I.T	: Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	42
Lampiran I.U	: Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru	43
Lampiran I.V	: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor	44
Lampiran I.W	: 1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis	46
	2. Laporan Realisasi Rasio Keuangan Pokok dan Pos - Pos Tertentu Lainnya	47
	3. Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor	50
	4. Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, Hasil Pelaksanaan Kewajiban Alih Pengetahuan, dan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	52
	5. Laporan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	53
	6. Laporan Realisasi <i>Linkage Program</i>	54
Lampiran I.X	: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	55

Lampiran I.A

**PROYEKSI POSISI KEUANGAN (NERACA)
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

No.	POS - POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des	Tahun X				Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
ASET									
1	Kas								
2	Penempatan pada Bank Indonesia								
3	Penempatan pada Bank Lain								
4	Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>								
5	Surat Berharga yang Dimiliki								
6	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)								
7	Tagihan Akseptasi								
8	Piutang								
	a. Piutang Murabahah								
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan								
	c. Piutang <i>Istishna'</i>								
	d. Pendapatan Margin <i>Istishna'</i> yang Ditangguhkan -/-								
	e. Piutang <i>Qardh</i>								
	f. Piutang Sewa								
9	Pembiayaan Bagi Hasil								
	a. <i>Mudharabah</i>								
	b. Musyarakah								
	c. Lainnya								
10	Pembiayaan Sewa								
	a. Aset Ijarah								
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-								
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-								
11	Penyertaan								
12	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-								
	a. Individual								
	b. Kolektif								
13	Aset Tidak Berwujud								
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -/-								
14	<i>Salam</i>								
15	Aset <i>Istishna'</i> dalam Penyelesaian Termin <i>Istishna'</i> -/-								
16	Aset Tetap dan Inventaris								
	Akumulasi Penyusutan -/-								
17	Properti Terbengkalai								
18	Aset Yang Diambil Alih (AYDA)								
19	Rekening Tunda								
20	Aset Antar Kantor								
	a. Kegiatan Operasional di Indonesia								
	b. Kegiatan Operasional di luar Indonesia								
21	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-								
22	Persediaan								
23	Aset Pajak Tangguhan								
24	Rupa-Rupa Aset								
	TOTAL ASET								

No.	POS - POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi					
			Tahun X			Des	Des	
			Des X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1
LIABILITAS DAN EKUITAS								
1	Dana Simpanan <i>Wadiah</i>							
	a. Giro							
	b. Tabungan							
2	Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i>							
	a. Giro							
	b. Tabungan							
	c. Deposito							
3	Liabilitas kepada Bank Indonesia							
4	Liabilitas kepada Bank Lain							
5	Liabilitas <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>							
6	Surat Berharga yang Diterbitkan							
7	Liabilitas Akseptasi							
8	Pembiayaan Diterima							
9	Setoran Jaminan							
10	Liabilitas Antar Kantor							
	a. Kegiatan Operasional di Indonesia							
	b. Kegiatan Operasional di luar Indonesia							
11	Liabilitas Pajak Tangguhan							
12	Rupa-Rupa Liabilitas							
13	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>							
	a. Giro							
	b. Tabungan							
	c. Deposito							
	d. Liabilitas kepada Bank Lain							
	e. Surat Berharga							
	f. Pembiayaan Diterima							
14	Modal Pinjaman							
15	Modal Disetor							
	a. Modal Dasar							
	b. Modal yang Belum Disetor -/-							
	c. Saham yang Dibeli Kembali (<i>Treasury Stock</i>) -/-							
16	Perkiraan Tambahan Modal Disetor							
	a. Agio							
	b. Disagio -/-							
	c. Modal Sumbangan							
	d. Dana Setoran Modal							
	e. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan							
	i. Selisih Lebih							
	ii. Selisih Kurang -/-							
	f. Pendapatan (Kerugian) Komprehensif Lainnya							
	i. Keuntungan							
	ii. Kerugian -/-							
	g. Lainnya							
	i. Keuntungan							
	ii. Kerugian -/-							
17	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap							
18	Cadangan							
	a. Umum							
	b. Tujuan							
19	Laba/Rugi							
	a. Tahun-tahun Lalu							
	i. Laba							
	ii. Rugi -/-							
	b. Tahun Berjalan							
	i. Laba							
	ii. Rugi -/-							
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan
X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi					
			Des	Tahun X			Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1
C	TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang Diterima 2. Pendapatan dalam Penyelesaian a. Terkait dengan Bank 1) Murabahah 2) <i>Istishna'</i> 3) Sewa 4) Bagi hasil 5) Lainnya b. Tidak Terkait dengan Bank 1) Murabahah 2) <i>Istishna'</i> 3) Sewa 4) Bagi Hasil 5) Lainnya 3. Lainnya a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank							
D	KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang Diberikan a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank 2. Lainnya a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank							
E	LAINNYA 1. Aset Produktif yang Dihapus Buku a. Aset Produktif 1) Pembiayaan yang Diberikan 2) Lainnya b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih 1) Pembiayaan yang Diberikan 2) Lainnya 2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank 3. Penerusan Dana Investasi Terikat							

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.C

**PROYEKSI LABA RUGI
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi					
			Des	Tahun X			Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1
I.	Pendapatan dari Penyaluran Dana 1. Dari Bank Indonesia a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) b. Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) c. Lainnya 2. Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain a. Bonus <i>Wadiah</i> 1) Giro 2) Tabungan b. Bagi Hasil 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito c. Lainnya 3. Surat Berharga a. Dari Bank Syariah lain b. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 4. Pembiayaan yang Diberikan a. Dari Bank lain 1) Pendapatan dari Piutang a) Murabahah b) <i>Istishna</i> c) <i>Ujrah</i> d) Lainnya 2) Pendapatan Bagi Hasil a) <i>Mudharabah</i> b) Musyarakah c) Lainnya 3) a) Pendapatan Sewa Ijarah b) Penyusutan Aset Ijarah -/- b. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 1) Pendapatan dari Piutang a) Murabahah b) <i>Istishna</i> c) <i>Ujrah</i> d) Lainnya 2) Pendapatan Bagi Hasil a) <i>Mudharabah</i> b) Musyarakah c) Lainnya 3) a) Pendapatan Sewa Ijarah b) Penyusutan Aset Ijarah -/- 4) Pendapatan <i>Salam</i> 5. Pendapatan dari Transaksi Antar Kantor a. Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Luar Indonesia b. Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Indonesia 6. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-							

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi					
			Des	Tahun X			Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1
II.	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi -/- 1. <i>Non Profit Sharing</i> a. Kepada Bank Lain 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito 4) Surat Berharga yang Diterbitkan 5) Pembiayaan Diterima 6) Lainnya b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito 4) Surat Berharga yang Diterbitkan 5) Pembiayaan Diterima 6) Lainnya c. Transaksi Antar Kantor 1) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Luar Indonesia 2) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Indonesia 2. <i>Profit Sharing</i> a. Kepada Bank Lain 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito 4) Surat Berharga yang Diterbitkan 5) Pembiayaan Diterima 6) Lainnya b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito 4) Surat Berharga yang Diterbitkan 5) Pembiayaan Diterima 6) Lainnya c. Transaksi Antar Kantor 1) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Luar Indonesia 2) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Indonesia							
III.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (I-II)							
IV.	Pendapatan Operasional Lainnya 1. Pendapatan dari Transaksi Surat Berharga a. Peningkatan Nilai Wajar Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi b. Keuntungan Penjualan Surat Berharga 2. Keuntungan Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> a. Perubahan Nilai Wajar b. Keuntungan Transaksi 3. Pendapatan Bank selaku <i>Mudharib</i> dalam <i>Mudharabah Muqayyadah</i> 4. Pendapatan dari Penyertaan, <i>Fee</i> /Komisi/Provisi a. Dividen b. Keuntungan dari Penyertaan dengan <i>Equity Method</i> c. <i>Fee</i> /Komisi/Provisi 5. Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai a. Aset Keuangan b. Aset Lainnya 6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah 7. Lainnya							

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des	Tahun X				Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
V.	Beban Operasional 1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia 2. Bonus Titipan <i>Wadiah</i> a. Bank Lain b. Lainnya 3. Beban Transaksi Surat Berharga a. Penurunan Nilai Wajar Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi b. Kerugian Penjualan 4. Kerugian Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> a. Perubahan Nilai Wajar b. Kerugian Transaksi 5. Kerugian dari Penyertaan dan Beban Komisi/Provisi 6. Premi Asuransi 7. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan a. Penempatan pada Bank Lain b. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> c. Surat Berharga d. Tagihan Akseptasi e. Piutang 1) Piutang Murabahah 2) Piutang <i>Istishna'</i> 3) Piutang Sewa 4) Piutang <i>Qardh</i> f. Pembiayaan Bagi Hasil 1) <i>Mudharabah</i> 2) Musyarakah 3) Lainnya g. Pembiayaan Sewa h. Penyertaan i. Lainnya 8. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya 9. Penyusutan/Amortisasi 10. Penyisihan Kerugian Risiko Operasional 11. Kerugian Terkait Risiko Operasional (termasuk Kerugian karena Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris) 12. Kerugian Restrukturisasi Pembiayaan 13. Biaya Perbaikan Aset Ijarah 14. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah 15. Tenaga Kerja a. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah b. Direksi c. Karyawan d. Lainnya 16. Pendidikan dan Pelatihan a. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah b. Direksi c. Karyawan d. Lainnya								

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des	Tahun X			Des	Des	
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
	17. Penelitian dan Pengembangan 18. Sewa 19. Promosi 20. Pajak-pajak (Tidak termasuk Pajak Penghasilan) 21. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Tetap dan Inventaris 22. Barang dan Jasa 23. Lainnya								
VI.	1. Laba Operasional 2. Rugi Operasional								
VII.	Pendapatan Non-Operasional 1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris 2. Keuntungan dari Penjabaran Transaksi Valuta Asing 3. Penerimaan Klaim Asuransi Kerugian Operasional 4. Lainnya								
VIII.	Beban Non-Operasional 1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris 2. Keuntungan dari Penjabaran Transaksi Valuta Asing 3. Lainnya								
IX.	1. Laba Non-Operasional 2. Rugi Non-Operasional								
X	1. Laba Tahun Berjalan 2. Rugi Tahun Berjalan								
XI.	Pajak Penghasilan 1. Taksiran Pajak Tahun Berjalan 2. Pajak Tangguhan a. Pendapatan b. Beban								
XII.	Laba/Rugi Bersih 1. Laba Bersih 2. Rugi Bersih								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.D

**PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

No.	JENIS PRODUK	Aktual		Proyeksi													
		Sept X-1		Des X-1		Tahun X						Des X+1		Des X+2			
		Nominal		Nominal		Maret		Juni		Sept		Des		Nominal		Nominal	
		Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾
A	JENIS PENYALURAN DANA																
1	Surat Berharga																
2	Pendapatan dari Piutang																
	a. Murabahah																
	b. <i>Istishna'</i>																
	c. <i>Ujrah</i>																
	d. Lainnya																
3	Pendapatan Bagi Hasil																
4	Pendapatan Sewa Ijarah																
5	Pendapatan <i>Salam</i>																
6	Pendapatan dari Penempatan pada Bank Lain																
B	JENIS PENGHIMPUNAN DANA																
1	<i>Non Profit Sharing</i>																
	a. Giro																
	b. Tabungan																
	c. Deposito																
	d. Liabilitas kepada Bank Lain																
	e. Surat Berharga yang Diterbitkan																
	f. Pembiayaan Diterima																
	g. Lainnya																
2	<i>Profit Sharing</i>																
	a. Giro																
	b. Tabungan																
	c. Deposito																
	d. Liabilitas kepada Bank Lain																
	e. Surat Berharga yang Diterbitkan																
	f. Pembiayaan Diterima																
	g. Lainnya																

¹⁾ Jumlah adalah nilai rata-rata dari saldo rata-rata jumlah penyaluran atau penghimpunan dana setiap bulan sampai dengan bulan laporan.

²⁾ Imbalan dalam penyaluran dana adalah jumlah pendapatan margin/bagi hasil/ *ujrah* yang diterima dari penyaluran pembiayaan untuk dibagikan pada setiap bulan sampai dengan bulan laporan.
Imbalan dalam penghimpunan dana adalah jumlah bagi hasil yang telah didistribusikan pada setiap bulan sampai dengan bulan laporan.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.E

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
PT BANK UMUM SYARIAH

jutaan Rp

No.	URAIAN	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des	Tahun X			Des	Des	
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
1	Saldo Awal Dana Zakat								
2	Dana Zakat yang Berasal dari: a. Internal BUS b. Eksternal BUS								
3	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat a. Lembaga Amil Zakat b. Badan Amil Zakat								
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat								
5	Saldo Akhir Dana Zakat								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.F

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

No.	URAIAN	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des	Tahun X				Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
1	Saldo Awal Dana Kebajikan								
2	Penerimaan Dana Kebajikan a. Infak b. Sedekah c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif d. Denda e. Penerimaan Non-Halal f. Lainnya								
	Total Penerimaan								
3	Penggunaan Dana Kebajikan a. Dana Kebajikan Produktif b. Sumbangan c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum								
	Total Penggunaan								
4	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan								
5	Saldo Akhir Dana Kebajikan								

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.G

**ASUMSI MAKRO DAN MIKRO YANG DIGUNAKAN
PT BANK UMUM SYARIAH**

No.	ASUMSI	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Desember	Tahun X ¹⁾			Des	Des	
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
ASUMSI MAKRO									
1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (%)								
2	Inflasi (%)								
3	Lainnya (dirinci per jenis asumsi) ²⁾								
ASUMSI MIKRO									
1	Pertumbuhan Pembiayaan (%)								
2	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)								
3	Tingkat Imbalan Dana Pihak Ketiga (%)								
4	Tingkat Imbalan Pembiayaan (%)								
5	Lainnya (dirinci per jenis asumsi) ³⁾								

¹⁾ Apabila tidak tersedia asumsi per triwulanan, dapat menggunakan asumsi per tahun.

²⁾ Asumsi makro lainnya, seperti nilai tukar, pertumbuhan nilai ekspor dan impor.

³⁾ Asumsi mikro lainnya, seperti pangsa BUS terhadap industri.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

No.	RASIO DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA	Aktual Sept X-1	Proyeksi					
			Des	Tahun X			Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+ 1
B	POS-POS TERTENTU LAINNYA							
1	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Mikro terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)							
2	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Kecil terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)							
3	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Menengah terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)							
4	Rasio Total Pembiayaan kepada UMKM terhadap Total Pembiayaan (%)							
5	a. Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran Sumber Daya (SDM) (%) ⁴⁾ b. Rasio Sisa Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun yang Digunakan untuk Tahun Berikutnya (%) ⁵⁾							
6	Rasio Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Bank terhadap Modal (%)							

- ¹⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.
- ²⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi BUS UUS.
- ³⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada penjelasan rasio keuangan pokok - Lampiran I.H.
- ⁴⁾ Cakupan dana pendidikan dan pelatihan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum.
- ⁵⁾ Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara kewajiban 5% (lima persen) dari realisasi.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

PENJELASAN RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS-POS TERTENTU LAINNYA

No.	RASIO KEUANGAN POKOK	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
RASIO KEUANGAN			
1	Rasio KPMM	$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar}}$	1) Perhitungan Modal dan ATMR mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS. 2) Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar didasarkan pada nilai tercatat aset dalam neraca (setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)).
2	Rasio Modal Inti terhadap ATMR	$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Total ATMR}}$	1) Perhitungan Modal Inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS. 2) Total ATMR meliputi ATMR untuk Risiko Kredit, ATMR untuk Risiko Operasional, dan ATMR untuk Risiko Pasar.
3	Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR	$\frac{\text{Modal Inti Utama}}{\text{Total ATMR}}$	1) Perhitungan Modal Inti Utama mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS. 2) Total ATMR meliputi ATMR untuk Risiko Kredit, ATMR untuk Risiko Operasional, dan ATMR untuk Risiko Pasar.
4	Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap	$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Modal Pelengkap}}$	1) Perhitungan Modal Inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS. 2) Perhitungan Modal Pelengkap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BUS.
5	Rasio Modal Inti terhadap Total Aset	$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Total Aset}}$	1) Perhitungan Modal Inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS. 2) Total Aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
6	<i>Return on Equity (ROE)</i>	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Ekuitas}}$	1) Laba Setelah Pajak adalah laba bersih tahun berjalan setelah pajak. 2) Penghitungan laba setelah pajak disetahunkan. Contoh: Untuk posisi Juni: (akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6) x 12 3) Rata-rata Ekuitas: rata-rata modal inti (<i>tier 1</i>) Contoh: Untuk posisi Juni: (penjumlahan modal inti Januari sampai dengan Juni) dibagi 6 4) Perhitungan Modal Inti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.
7	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	1) Laba Sebelum Pajak adalah laba tahun berjalan yang disetahunkan. 2) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tercantum pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8	<i>Net Operating Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil} - \text{Beban Operasional}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}}$	1) Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban operasional (disetahunkan). 2) Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban bagi hasil meliputi seluruh beban bagi hasil dari penghimpunan dana. 3) Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan). 4) Aset produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun di Transaksi Rekening Administratif (TRA). 5) Rata-rata Aset Produktif. Contoh: Untuk posisi Juni: penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.

No.	RASIO KEUANGAN POKOK	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
9	Net Imbalan (NI)	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil - (Imbalan dan Bonus)}}{\text{Rata-rata Total Aset Produktif}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil - (Imbalan dan Bonus) adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban imbal hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan). 2) Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana. 3) Aset produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA. 4) Rata-rata Aset Produktif. Contoh: Untuk posisi Juni: penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.
10	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beban operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan). 2) Total pendapatan operasional meliputi pendapatan margin, <i>ujrah</i>, dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya.
11	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Fee Based Income}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Fee Based Income</i> meliputi pendapatan komisi/provisi/<i>fee</i> yang berasal dari kegiatan penyaluran dana, pembiayaan, dan lainnya. 2) Total Pendapatan Operasional meliputi pendapatan margin, <i>ujrah</i>, dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya.
12	Rasio Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	$\frac{\text{Pembiayaan Bagi Hasil}}{\text{Total Pembiayaan}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan Bagi Hasil adalah seluruh pembiayaan dengan akad bagi hasil baik yang menggunakan metode <i>profit and loss sharing</i> maupun <i>revenue sharing</i>. 2) Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 3) Total Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
13	Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset produktif dan Aset Non-Produktif	$\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah + Aset Non-Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aset Produktif + Total Aset Non-Produktif}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cakupan komponen dan kualitas aset produktif dan aset non produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah adalah aset dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 3) Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca dan TRA, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 4) Total Aset Produktif dan Total Aset Non-Produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca dan TRA, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
14	Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	$\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah (diluar TRA)}}{\text{Total Aset Produktif (diluar TRA)}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cakupan komponen dan kualitas aset produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Aset Produktif Bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Aset produktif bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 3) Total Aset Produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
15	Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	$\frac{\text{CKPN Aset Keuangan}}{\text{Total Aset Produktif (diluar TRA)}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk BUS mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku, yang mencakup CKPN individual dan CKPN kolektif. 2) Perhitungan CKPN mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 3) Cakupan komponen aset produktif mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. Total aset produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca sebelum dikurangi CKPN.
16	Rasio CKPN yang Telah Dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Wajib Dibentuk	$\frac{\text{CKPN atas Aset Produktif Neraca + PPA atas Aset Produktif TRA}}{\text{PPA Wajib Dibentuk atas Aset Produktif Neraca dan TRA}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk BUS mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku, yang mencakup CKPN individual dan CKPN kolektif. 2) Perhitungan CKPN mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 3) Perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Produktif Neraca dan TRA mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS.
17	Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Gross	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 3) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 4) Pembiayaan Bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 5) Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
18	Rasio NPF Net	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah - CKPN Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 3) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 4) Pembiayaan Bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. 5) CKPN Pembiayaan Bermasalah adalah cadangan yang wajib dibentuk BUS untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), yang mencakup CKPN pembiayaan secara individual dan kolektif. 6) Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).

No.	RASIO KEUANGAN POKOK	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
19	Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Aset Produktif}}$	1) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 2) Total Aset Produktif adalah pembiayaan, surat berharga, penyertaan dan tagihan lainnya yang tercantum dalam neraca, baik kepada pihak ketiga bukan bank maupun kepada bank, termasuk kepada Bank Indonesia.
20	Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan	$\frac{\text{Pembiayaan kepada Debitur Inti}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) Pembiayaan kepada Debitur Inti meliputi pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank baik debitur individual maupun grup diluar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut: a. bagi BUS yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi pembiayaan kepada 10 debitur atau grup besar. b. bagi BUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi pembiayaan kepada 15 debitur atau grup besar. c. bagi BUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi pembiayaan kepada 25 debitur atau grup besar. 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
21	Rasio <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> terhadap Total Aset	$\frac{\text{Tagihan Spot dan Forward}}{\text{Total Aset}}$	1) Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> meliputi seluruh tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (Neraca). 2) Total Aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
22	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	$\frac{\text{Aset Likuid Primer + Aset Likuid Sekunder}}{\text{Total Aset}}$	1) Aset Likuid Primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga kategori tersedia untuk dijual/ <i>Available for Sale</i> (AFS) atau <i>trading</i> , dan seluruh surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu 1 tahun atau kurang. 2) Aset Likuid Sekunder meliputi : a. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dengan kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun; b. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>Hold to Maturity</i> (HTM) dan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun; dan c. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu > 5 tahun, dengan nilai <i>haircut</i> 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pasar. 3) Total aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
23	Rasio Aset Likuid Terhadap Pendanaan Jangka Pendek	$\frac{\text{Aset Likuid Primer + Aset Likuid Sekunder}}{\text{Pendanaan Jangka Pendek (Short Term Funding)}}$	1) Aset Likuid Primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga kategori AFS atau <i>trading</i> , dan seluruh surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu 1 tahun atau kurang. 2) Aset Likuid Sekunder meliputi : a. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dengan kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun; b. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori HTM dan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun; c. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu > 5 tahun, dengan nilai <i>haircut</i> 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pasar. 3) Pendanaan Jangka Pendek meliputi giro, tabungan, dan deposito dengan sisa jangka waktu ≤ 1 tahun
24	Rasio Deposan Inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga (DPK)	$\frac{\text{Deposan Inti}}{\text{DPK}}$	1) Deposan Inti mencakup 10, 25, atau 50 deposan terbesar dari total simpanan, berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut : a. bagi BUS yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp 1 triliun, meliputi 10 deposan; b. bagi BUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp 10 triliun meliputi 25 deposan; c. bagi BUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 10 triliun meliputi 50 deposan. 2) DPK meliputi giro, tabungan, dan deposito.
25	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{DPK}}$	1) Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 3) DPK mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank).
26	<i>Short Term Mismatch</i> (STM)	$\frac{\text{Aset Jangka Pendek}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$	1) Aset Jangka Pendek adalah aset likuid kurang dari 3 bulan selain kas, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Berkala Bank Umum Syariah. 2) Liabilitas Jangka Pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Berkala Bank Umum Syariah.
27	<i>Short Term Mismatch Plus</i> (STMP)	$\frac{\text{Aset Jangka Pendek + Kas + Secondary Reserves}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$	1) Aset Jangka Pendek adalah Aset likuid kurang dari 3 bulan termasuk kas, SWBI, dan SBSN dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Berkala Bank Umum Syariah. 2) Liabilitas Jangka Pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Berkala Bank Umum Syariah.

Lampiran I.I

**RENCANA PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

KELOMPOK	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
Dana Simpanan <i>Wadiah</i>						
A. Giro						
1. Rupiah						
2. Valuta Asing						
Total Giro ¹⁾						
B. Tabungan						
1. Rupiah						
2. Valuta Asing						
Total Tabungan ²⁾						
Total Dana Simpanan <i>Wadiah</i>						
Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i>						
A. Giro						
1. Rupiah						
2. Valuta Asing						
Total Giro ³⁾						
B. Tabungan						
1. Rupiah						
2. Valuta Asing						
Total Tabungan ⁴⁾						
C. Deposito						
1. Rupiah						
- 1 bulan						
- 3 bulan						
- 6 bulan						
- ≥ 12 bulan						
2. Valuta Asing						
- 1 bulan						
- 3 bulan						
- 6 bulan						
- ≥ 12 bulan						
Total Deposito ⁵⁾						
Total Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i>						
TOTAL PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA						
A. Rupiah						
B. Valuta Asing						
TOTAL DEPOSAN INTI⁶⁾						
% DEPOSAN INTI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA						

¹⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Simpanan *Wadiah* - Giro pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.1a.

²⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Simpanan *Wadiah* - Tabungan pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.1b.

³⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi *Non Profit Sharing* - Giro pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.2a.

⁴⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi *Non Profit Sharing* - Tabungan pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.2b.

⁵⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi *Non Profit Sharing* - Deposito pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.2c.

⁶⁾ Deposan inti adalah nasabah dana pihak ketiga terbesar secara kumulatif untuk jenis giro, tabungan dan deposito yang dibedakan berdasarkan jumlah total aset Bank sebagai berikut :

- total aset ≤ Rp 1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) nasabah dana pihak ketiga terbesar;
- Rp 1 triliun < total aset ≤ Rp 10 triliun, meliputi 25 (dua puluh lima) nasabah dana pihak ketiga terbesar; atau
- total aset > Rp 10 triliun, meliputi 50 (lima puluh) nasabah dana pihak ketiga terbesar.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.J

**RENCANA PENERBITAN SURAT BERHARGA
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

JENIS	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
A. RUPIAH						
1. Surat Berharga Pasar Uang Syariah						
a. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)						
b. Promes						
c. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah						
d. Surat Berharga Pasar Uang Lainnya						
2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah						
a. Sukuk Subordinasi						
b. Sukuk Lainnya						
c. Surat Berharga Pasar Modal Lainnya						
Total Surat Berharga - Rupiah						
B. VALUTA ASING						
1. Surat Berharga Pasar Uang Syariah						
a. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)						
b. Promes						
c. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah						
d. Surat Berharga Pasar Uang Lainnya						
2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah						
a. Sukuk Subordinasi						
b. Sukuk Lainnya						
c. Surat Berharga Pasar Modal Lainnya						
Total Surat Berharga - Valuta Asing						
TOTAL SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN¹⁾						

¹⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Surat Berharga yang Diterbitkan pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No. 6

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.K

RENCANA PENDANAAN LAINNYA¹⁾
PT BANK UMUM SYARIAH

jutaan Rp

JENIS PENDANAAN LAINNYA ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
JUMLAH						

¹⁾ Jenis pendanaan lainnya merupakan pendanaan selain dalam bentuk penghimpunan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan penerbitan surat berharga.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.L

RENCANA PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ¹⁾
PT BANK UMUM SYARIAH

jutaan Rp

NAMA PIHAK TERKAIT	JENIS PENYEDIAAN DANA ²⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
			Des X-1	Tahun X			
				Maret	Juni	Sept	Des
JUMLAH							
% PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT TERHADAP MODAL							

¹⁾ Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

²⁾ Jenis Penyediaan dana dikelompokkan menjadi:

a. Pembiayaan

b. Penyediaan dana lainnya, yang mencakup fasilitas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), selain Pembiayaan.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.M.1

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR INTI ¹⁾
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

NAMA PEMINJAM/KELOMPOK PEMINJAM	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
JUMLAH						
% PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR INTI TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN						

- ¹⁾ Debitur inti adalah nasabah peminjam terbesar secara individu atau kelompok di luar pihak terkait yang dibedakan berdasarkan jumlah total aset BUS sebagai berikut :
- a. total aset ≤ Rp 1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) nasabah peminjam terbesar;
 - b. Rp 1 triliun < total aset ≤ Rp 10 triliun, meliputi 15 (lima belas) nasabah peminjam terbesar; atau
 - c. total aset > Rp 10 triliun, meliputi 25 (dua puluh lima) nasabah peminjam terbesar.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.M.2

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

KEGIATAN USAHA TERTENTU ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
1 Properti						
2 Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)						
3 Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya						
4 Pembiayaan Kendaraan Bermotor						
5 Pembiayaan Perumahan						
6 Kartu Pembiayaan (<i>sharia card</i>)						
7 Perusahaan Sekuritas						
8 Perusahaan Pembiayaan						
9 Industri Pariwisata						
10 Lainnya (dirinci sesuai dengan kegiatan usaha yang menjadi fokus sebagian besar pemberian pembiayaan utama BUS, seperti : Perkapalan, Telekomunikasi, Pembangunan Jalan Tol, Pensiunan, Pegawai)						
JUMLAH						

¹⁾ Jenis kegiatan usaha tertentu yang tercantum pada lampiran ini hanya diisi untuk jenis usaha yang relevan sebagai fokus pemberian pembiayaan BUS dan BUS dapat menambahkan jenis kegiatan usaha lain yang sesuai dengan jenis usaha yang menjadi fokus pada masing-masing BUS. Untuk jenis kegiatan usaha yang tidak menjadi fokus pemberian pembiayaan BUS, cukup diisi TS (tidak signifikan).

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.M.3.a

RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI ¹⁾
PT BANK UMUM SYARIAH

jutaan Rp

SEKTOR EKONOMI		Aktual Sept X-1	Proyeksi			
			Des X-1	Tahun X		
				Maret	Juni	Sept
A	RUPIAH					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan					
2	Perikanan					
3	Pertambangan dan Penggalian					
4	Industri Pengolahan					
5	Listrik, Gas, dan Air					
6	Konstruksi					
7	Perdagangan Besar dan Eceran					
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi					
10	Perantara Keuangan					
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan					
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib					
13	Jasa Pendidikan					
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya					
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga					
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya					
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya					
19	Bukan Lapangan Usaha					
20	Lainnya					
JUMLAH RUPIAH						

SEKTOR EKONOMI	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
B VALUTA ASING						
1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalian						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
19 Bukan Lapangan Usaha						
20 Lainnya						
JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI ²⁾						

¹⁾ Penjelasan mengenai kategori sektor ekonomi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan BUS dan UUS (LSMK).

²⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 8, 9,10, dan 14.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.M.3.b

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

JENIS PENGGUNAAN	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
RUPIAH A. MODAL KERJA 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Investasi C. KONSUMSI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Konsumsi JUMLAH RUPIAH						
VALUTA ASING A. MODAL KERJA 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Investasi C. KONSUMSI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Konsumsi JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN¹⁾						

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 8, 9,10, dan 14.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.M.3.c

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PROVINSI
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

PROVINSI	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
1 Nanggroe Aceh Darussalam						
2 Sumatera Utara						
3 Sumatera Barat						
4 Bengkulu						
5 Riau						
6 Kepulauan Riau						
7 Jambi						
8 Sumatera Selatan						
9 Lampung						
10 Kepulauan Bangka Belitung						
11 DKI Jakarta						
12 Jawa Barat						
13 Banten						
14 Jawa Tengah						
15 DI Yogyakarta						
16 Jawa Timur						
17 Kalimantan Barat						
18 Kalimantan Tengah						
19 Kalimantan Selatan						
20 Kalimantan Timur						
21 Kalimantan Utara						
22 Bali						
23 Nusa Tenggara Barat						
24 Nusa Tenggara Timur						
25 Sulawesi Barat						
26 Sulawesi Utara						
27 Sulawesi Tengah						
28 Sulawesi Selatan						
29 Sulawesi Tenggara						
30 Gorontalo						
31 Maluku						
32 Maluku Utara						
33 Papua Barat						
34 Papua						
35						
JUMLAH¹⁾						

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 8, 9, 10 dan 14.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.M.3.d

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS AKAD
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

JENIS AKAD	Aktual Sept X-1	Des X-1	Proyeksi			
			Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
RUPIAH A. Piutang 1. Murabahah 2. <i>Istishna'</i> 3. <i>Qardh</i> 4. Piutang Sewa B. Pembiayaan 1. <i>Mudharabah</i> 2. Musyarakah 3. Lainnya C. Ijarah D. <i>Salam</i> JUMLAH RUPIAH						
VALUTA ASING A. Piutang 1. Murabahah 2. <i>Istishna'</i> 3. <i>Qardh</i> 4. Piutang Sewa B. Pembiayaan 1. <i>Mudharabah</i> 2. Musyarakah 3. Lainnya C. Ijarah D. <i>Salam</i> JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS AKAD¹⁾						

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 8, 9,10, dan 14.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.M.4.a

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
PT BANK UMUM SYARIAH**

SEKTOR EKONOMI	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
A USAHA MIKRO						
1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalian						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
19 Bukan Lapangan Usaha						
20 Lainnya						
JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA MIKRO						
B USAHA KECIL						
1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalian						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
19 Bukan Lapangan Usaha						
20 Lainnya						
JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA KECIL						
C USAHA MENENGAH						
1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalian						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
19 Bukan Lapangan Usaha						
20 Lainnya						
JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA MENENGAH						
JUMLAH PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI (A + B + C)						

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.M.4.b

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

JENIS PENGGUNAAN	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
RUPIAH A. MODAL KERJA 1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah Total Pembiayaan Investasi						
JUMLAH RUPIAH						
VALUTA ASING A. MODAL KERJA 1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah Total Pembiayaan Investasi						
JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN						

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.M.4.c

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
BERDASARKAN PROVINSI (LOKASI PROYEK/DEBITUR)
PT BANK UMUM SYARIAH**

PROVINSI		Aktual Sept X-1	Proyeksi			
			Des X-1	Tahun X		
				Maret	Juni	Sept
A USAHA MIKRO						
1	Nanggroe Aceh Darussalam					
2	Sumatera Utara					
3	Sumatera Barat					
4	Bengkulu					
5	Riau					
6	Kepulauan Riau					
7	Jambi					
8	Sumatera Selatan					
9	Lampung					
10	Kepulauan Bangka Belitung					
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat					
13	Banten					
14	Jawa Tengah					
15	DI Yogyakarta					
16	Jawa Timur					
17	Kalimantan Barat					
18	Kalimantan Tengah					
19	Kalimantan Selatan					
20	Kalimantan Timur					
21	Kalimantan Utara					
22	Bali					
23	Nusa Tenggara Barat					
24	Nusa Tenggara Timur					
25	Sulawesi Barat					
26	Sulawesi Utara					
27	Sulawesi Tengah					
28	Sulawesi Selatan					
29	Sulawesi Tenggara					
30	Gorontalo					
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua Barat					
34	Papua					
35					
JUMLAH						
B USAHA KECIL						
1	Nanggroe Aceh Darussalam					
2	Sumatera Utara					
3	Sumatera Barat					
4	Bengkulu					
5	Riau					
6	Kepulauan Riau					
7	Jambi					
8	Sumatera Selatan					
9	Lampung					
10	Kepulauan Bangka Belitung					
11	DKI Jakarta					
12	Jawa Barat					
13	Banten					
14	Jawa Tengah					
15	DI Yogyakarta					
16	Jawa Timur					
17	Kalimantan Barat					
18	Kalimantan Tengah					
19	Kalimantan Selatan					
20	Kalimantan Timur					
21	Kalimantan Utara					
22	Bali					
23	Nusa Tenggara Barat					
24	Nusa Tenggara Timur					
25	Sulawesi Barat					
26	Sulawesi Utara					
27	Sulawesi Tengah					
28	Sulawesi Selatan					
29	Sulawesi Tenggara					
30	Gorontalo					
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua Barat					
34	Papua					
35					
JUMLAH						

jutaan Rp

PROVINSI	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
C USAHA MENENGAH						
1 Nanggroe Aceh Darussalam						
2 Sumatera Utara						
3 Sumatera Barat						
4 Bengkulu						
5 Riau						
6 Kepulauan Riau						
7 Jambi						
8 Sumatera Selatan						
9 Lampung						
10 Kepulauan Bangka Belitung						
11 DKI Jakarta						
12 Jawa Barat						
13 Banten						
14 Jawa Tengah						
15 DI Yogyakarta						
16 Jawa Timur						
17 Kalimantan Barat						
18 Kalimantan Tengah						
19 Kalimantan Selatan						
20 Kalimantan Timur						
21 Kalimantan Utara						
22 Bali						
23 Nusa Tenggara Barat						
24 Nusa Tenggara Timur						
25 Sulawesi Barat						
26 Sulawesi Utara						
27 Sulawesi Tengah						
28 Sulawesi Selatan						
29 Sulawesi Tenggara						
30 Gorontalo						
31 Maluku						
32 Maluku Utara						
33 Papua Barat						
34 Papua						
35						
JUMLAH						
JUMLAH PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN PROVINSI						

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.N

**RENCANA PENANAMAN DANA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

JENIS	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
A. RUPIAH						
1. Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah a. Surat Perbendaharaan Negara Syariah b. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank c. Promes d. Wesel 1) Wesel Ekspor 2) Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) 3) Wesel Lainnya e. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah f. Lainnya 2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah a. Sertifikat Reksadana Syariah b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Sukuk Negara 2) Sukuk Ritel c. Sukuk Subordinasi d. Sukuk Lainnya e. Efek Beragun Aset f. Lainnya						
JUMLAH RUPIAH						
B. VALUTA ASING						
1. Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah a. Surat Perbendaharaan Negara Syariah b. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank c. Promes d. Wesel 1) Wesel Ekspor 2) Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) 3) Wesel Lainnya e. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah f. Lainnya 2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah a. Sertifikat Reksadana Syariah b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Sukuk Negara 2) Sukuk Ritel c. Sukuk Subordinasi d. Sukuk Lainnya e. Efek Beragun Aset f. Lainnya						
JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PENANAMAN DANA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA ¹⁾						

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total surat berharga yang dimiliki pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 5.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.O

RENCANA PENANAMAN DANA LAINNYA
PT BANK UMUM SYARIAH

jutaan Rp

JENIS PENANAMAN DANA LAINNYA	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
JUMLAH						

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.P

**RENCANA PENYERTAAN MODAL
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

NAMA PERUSAHAAN		Aktual Sept X-1	Proyeksi			
			Des X-1	Tahun X		
				Maret	Juni	Sept
A. PENYERTAAN MODAL						
1	...					
2	...					
3	...					
4	...					
dst						
Total Penyertaan Modal						
B. PENYERTAAN MODAL SEMENTARA						
1	...					
2	...					
3	...					
4	...					
dst						
Total Penyertaan Modal Sementara						
JUMLAH PENYERTAAN MODAL ¹⁾						

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total penyertaan pada Lampiran I.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 11.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

KOMPONEN MODAL		Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des X-1	Tahun X				Des X+1	Des X+2
				Maret	Juni	Sept	Des		
II	Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) 1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan <i>Tier 2</i> 2 Agio/Disagio 3 Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit) 4 Cadangan tujuan 5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap ¹⁾ 5.1 <i>Sinking Fund</i> 5.2 Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> pada bank lain ²⁾	(-/-) (-/-)							
Total Modal ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ATMR RISIKO KREDIT Selisih lebih cadangan umum PPA atas aset produktif yang menjadi pengurang ATMR Risiko Kredit ATMR RISIKO PASAR ATMR RISIKO OPERASIONAL TOTAL ATMR RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO % RASIO KPMM Rasio CET 1 Rasio <i>Tier 1</i> Rasio <i>Tier 2</i> Rasio KPMM CET 1 UNTUK <i>BUFFER</i> PRESENTASE <i>BUFFER</i> YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK <i>Capital Conservation Buffer</i> ³⁾ <i>Countercyclical Buffer</i> ⁴⁾ <i>Capital Surcharge</i> untuk D-SIB ⁵⁾		(-/-)							

¹⁾ Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

²⁾ Investasi pada instrumen keuangan yang merupakan instrumen ekuitas yang diakui sebagai modal di bank lain dikurangkan pada masing-masing modal.

³⁾ Berlaku bagi Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Conservation Buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.

⁴⁾ Berlaku bagi Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Countercyclical Buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.

⁵⁾ Berlaku bagi Bank yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan *systemically important bank dan capital surcharge*.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.R

**RENCANA PERUBAHAN MODAL
PT BANK UMUM SYARIAH**

jutaan Rp

	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
		Des X-1	Tahun X Maret	Juni	Sept	Des	Des X+1	Des X+2
POSISI MODAL								
A. Nama Pemegang Saham								
1 ...								
2 ...								
3 ...								
4 ...								
5 ...								
dst								
Total Modal Disetor								
B. <i>Initial Public Offering (IPO) - Go Public</i>								
C. <i>Right Issue</i>								
D. Lainnya								
JUMLAH POSISI MODAL (A+B+C+D)								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.S.1

**KONDISI DAN RENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA¹⁾
PT BANK UMUM SYARIAH**

No.	POSISI JABATAN ²⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
			Des X-1	Tahun X			
				Maret	Juni	Sept	Des
1							
2							
3							
4							
5							

¹⁾ Diisi dengan angka jumlah sumber daya manusia.

²⁾ Posisi Jabatan diisi sesuai dengan struktur organisasi BUS mulai pejabat satu tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai terendah, termasuk staf ahli seperti tenaga kontrak profesional, staf khusus direksi (di luar *outsourcing*).

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.S.2

**RENCANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PT BANK UMUM SYARIAH**

NO.	JENIS PENDIDIKAN/PELATIHAN	JENIS JABATAN	JUMLAH	WAKTU	LEMBAGA PENYELENGGARA	RENCANA BIAYA
1						
2						
3						
4						
5						

Lampiran I.T

**RENCANA PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING
DAN PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING)
PT BANK UMUM SYARIAH**

A Tenaga Kerja Asing (TKA)

NO.	BIDANG TUGAS DAN POSISI		JUMLAH	NAMA TKA	JANGKA WAKTU	NAMA TENAGA PENDAMPING	RENCANA PROGRAM ALIH PENGETAHUAN
	POSISI JABATAN	LINGKUP					
1	Komisaris						
2	Direktur						
3	Pimpinan Kantor Perwakilan						
4	Pejabat Eksekutif						
5	Tenaga Ahli/Konsultan						
6	Jabatan lainnya ¹⁾						
Alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia :							
a.							
b.							
dst							

¹⁾ Jika ada, sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

B Tenaga Alih Daya (Outsourcing)²⁾

NO.	BIDANG KERJA PENUGASAN ³⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi			
			Des X-1	Tahun X		
				Maret	Juni	Sept
1						
2						
3						
4						
dst						

²⁾ Diisi dengan angka jumlah Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*).

³⁾ Bidang Kerja Penugasan diisi antara lain mengacu pada Lampiran I.B Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran I.U

**RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU ¹⁾
PT BANK UMUM SYARIAH**

NO.	JENIS	RENCANA WAKTU PENERBITAN ATAU PELAKSANAAN	TUJUAN/MANFAAT		KETERKAITAN PRODUK ATAU AKTIVITAS BARU DENGAN STRATEGI BUS ²⁾	DESKRIPSI UMUM ²⁾	RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL ²⁾	MITIGASI RISIKO ATAS PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU
			BAGI BUS	BAGI NASABAH				
A.	PRODUK							
1								
2								
dst.								
B.	AKTIVITAS							
1								
2								
dst.								

¹⁾ Hanya produk dan/atau aktivitas baru yang belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BUS.

²⁾ Penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Keterangan:

Bagi BUS yang ingin menyelenggarakan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), rencana penyelenggaraan Laku Pandai juga disertai dengan informasi dan penjelasan mengenai jumlah dan jenis agen yang ditargetkan per tahun selama 3 (tiga) tahun pertama penyelenggaraan dan untuk kerjasama pada tahun pertama disertai dengan rincian lokasi kabupaten/kota.

Lampiran I.V

**RENCANA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR
PT BANK UMUM SYARIAH**

NO.	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN ¹⁾	PERKIRAAN INVESTASI/BIAYA	LOKASI ²⁾	KETERANGAN ³⁾
A	PEMBUKAAN					
1	Kantor Wilayah 1) dst..					
2	Kantor Cabang 1) dst..					
3	Kantor Cabang Pembantu 1) dst..					
4	Kantor Kas 1) dst..					
5	Kantor Fungsional 1) dst..					
6	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst..					
7	Layanan Syariah Bank 1) dst..					
8	Kantor di Luar Negeri 1) dst..					
B	PERUBAHAN					
1	Kantor Wilayah 1) dst..					
2	Kantor Cabang 1) dst..					
3	Kantor Cabang Pembantu 1) dst..					
4	Kantor Kas 1) dst..					
5	Kantor Fungsional 1) dst..					
6	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst..					
7	Layanan Syariah Bank 1) dst..					
8	Kantor di Luar Negeri 1) dst..					

NO	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN ¹⁾	PERKIRAAN INVESTASI/BIAYA	LOKASI ²⁾	KETERANGAN ³⁾
C PEMINDAHAN ALAMAT						
1	Kantor Wilayah 1) dst..					
2	Kantor Cabang 1) dst..					
3	Kantor Cabang Pembantu 1) dst..					
4	Kantor Kas 1) dst..					
5	Kantor Fungsional 1) dst..					
6	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst..					
7	Layanan Syariah Bank 1) dst..					
8	Kantor di Luar Negeri 1) dst..					
D PENUTUPAN						
1	Kantor Wilayah 1) dst..					
2	Kantor Cabang 1) dst..					
3	Kantor Cabang Pembantu 1) dst..					
4	Kantor Kas 1) dst..					
5	Kantor Fungsional 1) dst..					
6	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst..					
7	Layanan Syariah Bank 1) dst..					
8	Kantor di Luar Negeri 1) dst..					

¹⁾ Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.

²⁾ Untuk lokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit mencantumkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi. Untuk lokasi di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama kabupaten/kota.

³⁾ Keterangan yang lebih rinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Keterangan:

Formulir ini dilengkapi dengan perhitungan ketersediaan alokasi modal inti dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembukaan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Lampiran I.W.1

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS¹⁾

PT BANK UMUM SYARIAH

PERIODE :

<p>a. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, prioritas pencapaian Rencana Bisnis, dan perbandingan antara Rencana Bisnis dengan realisasinya.²⁾</p> <p>b. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.</p> <p>c. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.</p>
--

¹⁾ Jumlah halaman/ukuran dalam lampiran ini tidak mengikat sehingga BUS dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan dalam lembaran yang terpisah.

Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

²⁾ Perbandingan Rencana Bisnis dengan realisasi selain mencakup Lampiran I.W.2, BUS perlu juga menjelaskan besaran realisasi yang terkait dengan proyeksi keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan rencana permodalan yang belum tercakup dalam lampiran tersebut.

Lampiran I.W.2

LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA
PT BANK UMUM SYARIAH
PERIODE :..... 1)

NO.	RASIO DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA	TARGET	REALISASI	DEVIASI	KETERANGAN
A	RASIO KEUANGAN POKOK				
1	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) ²⁾				
2	Rasio Modal Inti terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ²⁾				
3	Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR				
4	Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap				
5	Rasio Modal Inti terhadap Total Aset ²⁾				
6	<i>Return on Equity (ROE) (%)</i> ³⁾				
7	<i>Return on Asset (ROA) (%)</i> ³⁾				
8	<i>Net Operating Margin (%)</i> ³⁾				
9	<i>Net Imbalan (NI)</i> ³⁾				
10	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)				
11	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional				
12	Rasio Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan				
13	Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non-Produktif				
14	Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif				
15	Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif				
16	Rasio CKPN yang Telah Dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Wajib Dibentuk				
17	Rasio <i>Non Performing Financing (NPF)</i> ²⁾ - <i>Gross</i> - <i>Netto</i>				
18	Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif				
19	Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan				

NO.	RASIO DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA	TARGET	REALISASI	DEVIASI	KETERANGAN
20	Rasio Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) terhadap Total Pembiayaan				
21	Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik <i>Committed</i> - Rupiah - Valuta Asing <i>Uncommitted</i> - Rupiah - Valuta Asing				
22	Rasio <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> terhadap Total Aset				
23	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset				
24	Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek				
25	Rasio Deposan Inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga				
26	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (%) ³⁾				
27	<i>Short Term Mismatch</i> (STM) (%) ⁴⁾				
28	<i>Short Term Mismatch Plus</i> (STMP) (%) ⁴⁾				

NO.	RASIO DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA	TARGET	REALISASI	DEVIASI	KETERANGAN
B	POS-POS TERTENTU LAINNYA				
1	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Mikro terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)				
2	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Kecil terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)				
3	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Menengah terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)				
4	Rasio Total Pembiayaan kepada UMKM terhadap Total Pembiayaan (%)				
5	a. Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran Sumber Daya Manusia (%) ⁵⁾				
	b. Rasio Sisa Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun Ini yang Digunakan untuk Tahun Berikutnya (%) ⁶⁾				
6	Rasio Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Bank terhadap Modal (%)				

1) Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

2) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum BUS.

3) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi BUS dan UUS.

4) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada penjelasan rasio keuangan pokok - Lampiran I.H.

5) Cakupan dana pendidikan dan pelatihan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum.

6) Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara kewajiban 5% (lima persen) dari realisasi.

Lampiran I.W.3

**LAPORAN REALISASI PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR
PT BANK UMUM SYARIAH
PERIODE :..... 1)**

NO.	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	TANGGAL REALISASI	LOKASI ²⁾	KETERANGAN ³⁾
A	PEMBUKAAN				
1	Kantor Wilayah 1) dst..				
2	Kantor Cabang 1) dst..				
3	Kantor Cabang Pembantu 1) dst..				
4	Kantor Kas 1) dst..				
5	Kantor Fungsional 1) dst..				
6	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst..				
7	Layanan Syariah Bank 1) dst..				
8	Kantor di Luar Negeri 1) dst..				
B	PERUBAHAN STATUS				
1	Kantor Wilayah 1) dst..				
2	Kantor Cabang 1) dst..				
3	Kantor Cabang Pembantu 1) dst..				
4	Kantor Kas 1) dst..				
5	Kantor Fungsional 1) dst..				
6	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst..				
7	Layanan Syariah Bank 1) dst..				
8	Kantor di Luar Negeri 1) dst..				

NO	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	TANGGAL REALISASI	LOKASI ²⁾	KETERANGAN ³⁾
C PEMINDAHAN ALAMAT					
1	Kantor Wilayah 1) dst..				
2	Kantor Cabang 1) dst..				
3	Kantor Cabang Pembantu 1) dst..				
4	Kantor Kas 1) dst..				
5	Kantor Fungsional 1) dst..				
6	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst..				
7	Layanan Syariah Bank 1) dst..				
8	Kantor di Luar Negeri 1) dst..				
D PENUTUPAN					
1	Kantor Wilayah 1) dst..				
2	Kantor Cabang 1) dst..				
3	Kantor Cabang Pembantu 1) dst..				
4	Kantor Kas 1) dst..				
5	Kantor Fungsional 1) dst..				
6	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst..				
7	Layanan Syariah Bank 1) dst..				
8	Kantor di Luar Negeri 1) dst..				

¹⁾ Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

²⁾ Diisi dengan mencantumkan alamat lengkap termasuk nomor telepon dan nomor faksimili.

³⁾ Keterangan yang lebih rinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Lampiran I.W.4

**LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING, HASIL PELAKSANAAN
KEWAJIBAN ALIH PENGETAHUAN, DAN TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING)
PT BANK UMUM SYARIAH
PERIODE :..... 1)**

A. Tenaga Kerja Asing (TKA)

NO.	NAMA TKA	BIDANG TUGAS	POSISI/JABATAN		NAMA PENDAMPING	HASIL EVALUASI TERHADAP PENDAMPING	PENDIDIKAN / PELATIHAN KEPADA PENDAMPING	LEMBAGA PELAKSANA	KETERANGAN
			TKA	PENDAMPING					
1					1. 2.				
2					1. 2.				
dst					dst				

B. Hasil Pelaksanaan Kewajiban Alih Pengetahuan²⁾

NO.	NAMA TKA	WAKTU PELATIHAN / PENGAJARAN	LOKASI PELATIHAN / PENGAJARAN	JUMLAH PESERTA	JANGKA WAKTU	MATERI / TOPIK
1		1. 2.				
2		1. 2.				
dst		dst				

C. Tenaga Alih Daya (Outsourcing)

NO.	POSISI JABATAN	BIDANG KERJA PENUGASAN ³⁾	JUMLAH	JANGKA WAKTU
1				
2				
dst				

¹⁾ Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

²⁾ Disertai lampiran foto - foto kegiatan pelatihan

³⁾ Bidang Kerja Penugasan diisi antara lain mengacu pada Lampiran I.B Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.

Lampiran I.W.5

LAPORAN REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PT BANK UMUM SYARIAH
PERIODE :..... 1)

NO.	JENIS PENDIDIKAN/PELATIHAN	JENIS JABATAN	JUMLAH	WAKTU REALISASI	LEMBAGA PENYELENGGARA	REALISASI BIAYA	KETERANGAN
1							
2							
3							
4							
dst							

1) Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

Lampiran I.W.6

LAPORAN REALISASI LINKAGE PROGRAM
PT BANK UMUM SYARIAH
PERIODE :..... 1)

jutaan Rp

NO.	PIHAK PERANTARA	KUALITAS	JUMLAH	
			REKENING	NOMINAL
A.	CHANNELLING 1	1. Lancar		
		2. Dalam Perhatian Khusus		
		3. Kurang Lancar		
		4. Diragukan		
		5. Macet		
	2	1. Lancar		
		2. Dalam Perhatian Khusus		
		3. Kurang Lancar		
		4. Diragukan		
		5. Macet		
	dst	1. Lancar		
		2. Dalam Perhatian Khusus		
		3. Kurang Lancar		
		4. Diragukan		
		5. Macet		
	JUMLAH	1. Lancar		
2. Dalam Perhatian Khusus				
3. Kurang Lancar				
4. Diragukan				
5. Macet				
B.	EXECUTING 1 2 dst JUMLAH	1. Lancar		
		2. Dalam Perhatian Khusus		
		3. Kurang Lancar		
		4. Diragukan		
		5. Macet		
		JUMLAH REALISASI LINKAGE PROGRAM (A + B)		

1) Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

Lampiran I.X

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS¹⁾
PT BANK UMUM SYARIAH
PERIODE :.....

- a. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.²⁾

- b. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan, rentabilitas, tata kelola yang baik, dan profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.²⁾

- c. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya perbaikan kinerja BUS, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja BUS sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat penurunan kinerja.²⁾

¹⁾ Jumlah halaman/ukuran dalam lampiran ini tidak mengikat sehingga BUS dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan dalam lembaran yang terpisah. Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

²⁾ Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf c dapat dilengkapi dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BUS.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2018
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

HERU KRISTIYANA

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8 /SEOJK.03/2018

TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran II.A	: Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)	1
Lampiran II.B	: Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi	3
Lampiran II.C	: Proyeksi Laba Rugi	5
Lampiran II.D	: Perhitungan Distribusi Bagi Hasil	9
Lampiran II.E	: Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10
Lampiran II.F	: Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11
Lampiran II.G	: Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan	12
Lampiran II.H	: Proyeksi Rasio Keuangan Pokok dan Pos - Pos Tertentu Lainnya	13
Lampiran II.I	: Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	18
Lampiran II.J	: Rencana Penerbitan Surat Berharga	19
Lampiran II.K	: Rencana Pendanaan Lainnya	20
Lampiran II.L	: Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	21
Lampiran II.M	: 1. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Inti	22
	2. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu	23
	3. a. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	24
	b. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan	25
	c. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Provinsi	26
	d. Rencana Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad	27
	4. a. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Sektor Ekonomi	28
	b. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Jenis Penggunaan	29
	c. Rencana Pemberian Pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Provinsi (Lokasi Proyek/Debitur)	30
Lampiran II.N	: Rencana Penanaman Dana dalam Bentuk Surat Berharga	32
Lampiran II.O	: Rencana Penanaman Dana Lainnya	33
Lampiran II.P	: Rencana Perubahan Modal	34

Lampiran II.Q	: 1. Kondisi dan Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia	35
	2. Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	36
Lampiran II.R	: Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Penggunaan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	37
Lampiran II.S	: Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru	38
Lampiran II.T	: Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor	39
Lampiran II.U	: 1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis	41
	: 2. Laporan Realisasi Rasio Keuangan Pokok dan Pos - Pos Tertentu Lainnya	42
	: 3. Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor	44
	4. Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, Hasil Pelaksanaan Kewajiban Alih Pengetahuan, dan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	46
	5. Laporan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	47
	6. Laporan Realisasi <i>Linkage Program</i>	48
Lampiran II.V	: Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	49

Lampiran II.A

PROYEKSI POSISI KEUANGAN (NERACA)
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

jutaan Rp

No.	POS - POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi					
			Des	Tahun X			Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1
ASET								
1	Kas							
2	Penempatan pada Bank Indonesia							
3	Penempatan pada Bank Lain							
4	Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>							
5	Surat Berharga yang Dimiliki							
6	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)							
7	Tagihan Akseptasi							
8	Piutang							
	a. Piutang Murabahah							
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-							
	c. Piutang <i>Istishna'</i>							
	d. Pendapatan Margin <i>Istishna'</i> yang ditangguhkan -/-							
	e. Piutang <i>Qardh</i>							
	f. Piutang Sewa							
9	Pembiayaan Bagi Hasil							
	a. <i>Mudharabah</i>							
	b. Musyarakah							
	c. Lainnya							
10	Pembiayaan Sewa							
	a. Aset Ijarah							
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-							
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-							
11	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-							
	a. Individual							
	b. Kolektif							
12	Aset Tidak Berwujud							
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -/-							
13	<i>Salam</i>							
14	Aset <i>Istishna'</i> dalam Penyelesaian							
	Termin <i>Istishna'</i> -/-							
15	Aset Tetap dan Inventaris							
	Akumulasi Penyusutan -/-							
16	Properti Terbengkalai							
17	Aset Yang Diambil Alih (AYDA)							
18	Rekening Tunda							
19	Aset Antar Kantor							
	a. Kegiatan Operasional di Indonesia							
	b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia							
20	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya							
21	Perseediaan							
22	Aset Pajak Tangguhan							
23	Rupa-Rupa Aset							
TOTAL ASET								

No.	POS - POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des	Tahun X				Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
LIABILITAS DAN EKUITAS									
1	Dana Simpanan <i>Wadiah</i> a. Giro b. Tabungan								
2	Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i> a. Giro b. Tabungan c. Deposito								
3	Liabilitas kepada Bank Indonesia								
4	Liabilitas kepada Bank Lain								
5	Liabilitas <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>								
6	Surat Berharga yang Diterbitkan								
7	Liabilitas Akseptasi								
8	Pembiayaan Diterima								
9	Setoran Jaminan								
10	Liabilitas Antar Kantor a. Kegiatan Operasional di Indonesia b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia								
11	Liabilitas Pajak Tangguhan								
12	Rupa-Rupa Liabilitas								
13	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i> a. Giro b. Tabungan c. Deposito d. Liabilitas kepada Bank Lain e. Surat Berharga f. Pembiayaan Diterima								
14	Laba/Rugi a. Tahun-tahun Lalu i. Laba ii. Rugi -/- b. Tahun Berjalan i. Laba ii. Rugi -/-								
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS									

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.B

PROYEKSI KOMITMEN DAN KONTINJENSI
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

jutaan Rp

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des	Tahun X				Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
A	TAGIHAN KOMITMEN								
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik								
	a. Terkait dengan Bank								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								
	2. Posisi Pembelian <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> yang Masih Berjalan								
	a. Terkait dengan Bank								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								
	3. Lainnya								
	a. Terkait dengan Bank								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								
B	KEWAJIBAN KOMITMEN								
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik								
	a. Pihak Ketiga Bukan Bank								
	1) <i>Committed</i>								
	2) <i>Uncommitted</i>								
	b. Bank								
	1) <i>Committed</i>								
	2) <i>Uncommitted</i>								
	2. <i>Irrevocable L/C</i> yang Masih Berjalan								
	a. <i>L/C</i> Luar Negeri								
	b. <i>L/C</i> Dalam Negeri								
	3. Posisi Penjualan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> yang Masih Berjalan								
	a. Terkait dengan Bank								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								
	4. Lainnya								
	a. Terkait dengan Bank								
	b. Tidak Terkait dengan Bank								

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi					
			Des	Tahun X			Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1
C	TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang Diterima 2. Pendapatan dalam Penyelesaian a. Terkait dengan Bank 1) Murabahah 2) <i>Istishna'</i> 3) Sewa 4) Bagi hasil 5) Lainnya b. Tidak Terkait dengan Bank 1) Murabahah 2) <i>Istishna'</i> 3) Sewa 4) Bagi hasil 5) Lainnya 3. Lainnya a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank							
D	KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang Diberikan a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank 2. Lainnya a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank							
E	LAINNYA 1. Aset Produktif yang Dihapus Buku a. Aset Produktif i. Pembiayaan yang Diberikan ii. Lainnya b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih i. Pembiayaan yang Diberikan ii. Lainnya 2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih a. Terkait dengan Bank b. Tidak Terkait dengan Bank 3. Penerusan Dana Investasi Terikat							

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi					
			Des	Tahun X			Des	Des
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1
II	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi -/- 1. <i>Non Profit Sharing</i> a. Kepada Bank Lain 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito 4) Surat Berharga yang Diterbitkan 5) Pembiayaan Diterima 6) Lainnya b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito 4) Surat Berharga yang Diterbitkan 5) Pembiayaan Diterima 6) Lainnya c. Transaksi Antar Kantor 1) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Luar Indonesia 2) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Indonesia 2. <i>Profit Sharing</i> a. Kepada Bank lain 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito 4) Surat Berharga yang Diterbitkan 5) Pembiayaan Diterima 6) Lainnya b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank 1) Giro 2) Tabungan 3) Deposito 4) Surat Berharga yang Diterbitkan 5) Pembiayaan Diterima 6) Lainnya c. Transaksi Antar Kantor 1) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Luar Indonesia 2) Kantor Pusat/Cabang Sendiri di Indonesia							
III	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (I-II)							
IV	Pendapatan Operasional Lainnya 1. Pendapatan dari Transaksi Surat Berharga a. Peningkatan Nilai Wajar Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi b. Keuntungan Penjualan Surat Berharga 2. Keuntungan Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> a. Perubahan Nilai Wajar b. Keuntungan Transaksi 3. Pendapatan Bank Selaku <i>Mudharib</i> dalam <i>Mudharabah Muqayyadah</i> 4. Pendapatan dari Penyertaan, <i>Fee</i> /Komisi/Provisi a. Dividen b. Keuntungan dari Penyertaan dengan <i>Equity Method</i> c. <i>Fee</i> /Komisi/Provisi 5. Koreksi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai a. Aset Keuangan b. Aset Lainnya 6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah 7. Lainnya							

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi					
			Tahun X		Des		Des	
			Des X-1	Maret	Juni	Sept	Des	Des X+1
V	Beban Operasional 1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia 2. Bonus Titipan <i>Wadiah</i> a. Bank Lain b. Lainnya 3. Beban Transaksi Surat Berharga a. Penurunan Nilai Wajar Surat Berharga yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi b. Kerugian Penjualan 4. Kerugian Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> a. Perubahan Nilai Wajar b. Kerugian Transaksi 5. Kerugian dari Penyertaan dan Beban Komisi/Provisi 6. Premi Asuransi 7. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan a. Penempatan pada Bank Lain b. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> c. Surat Berharga d. Tagihan Akseptasi e. Piutang 1) Piutang Murabahah 2) Piutang <i>Istishna'</i> 3) Piutang Sewa 4) Piutang <i>Qardh</i> f. Pembiayaan Bagi Hasil 1) <i>Mudharabah</i> 2) Musyarakah 3) Lainnya g. Pembiayaan Sewa h. Lainnya 8. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya 9. Penyusutan/Amortisasi 10. Penyisihan Kerugian Risiko Operasional 11. Kerugian Terkait Risiko Operasional (termasuk Kerugian karena Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris) 12. Kerugian Restrukturisasi Pembiayaan 13. Biaya Perbaikan Aset Ijarah 14. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah 15. Tenaga Kerja a. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah b. Direksi c. Karyawan d. Lainnya 16. Pendidikan dan Pelatihan a. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah b. Direksi c. Karyawan d. Lainnya							

No.	POS-POS	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des		Tahun X		Des		
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
	17. Penelitian dan Pengembangan								
	18. Sewa								
	19. Promosi								
	20. Pajak-pajak (Tidak termasuk Pajak Penghasilan)								
	21. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Tetap dan Inventaris								
	22. Barang dan Jasa								
	23. Lainnya								
VI	1. Laba Operasional								
	2. Rugi Operasional								
VII	Pendapatan Non-Operasional								
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris								
	2. Keuntungan dari Penjabaran Transaksi Valuta Asing								
	3. Penerimaan Klaim Asuransi Kerugian Operasional								
	4. Lainnya								
VIII	Beban Non-Operasional								
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris								
	2. Keuntungan dari Penjabaran Transaksi Valuta Asing								
	3. Lainnya								
IX	1. Laba Non-Operasional								
	2. Rugi Non-Operasional								
X	1. Laba Tahun Berjalan								
	2. Rugi Tahun Berjalan								
XI	Pajak Penghasilan								
	1. Taksiran Pajak Tahun Berjalan								
	2. Pajak Tangguhan								
	a. Pendapatan								
	b. Beban								
XII	Laba/Rugi Bersih								
	1. Laba Bersih								
	2. Rugi Bersih								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.D

**PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

No.	JENIS PRODUK	Aktual Sept X-1		Proyeksi													
				Des X-1		Tahun X				Des X+1		Des X+2					
		Nominal		Nominal		Maret		Juni		Sept		Des		Nominal		Nominal	
		Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾	Jumlah ¹⁾	Imbalan ²⁾
A	JENIS PENYALURAN DANA																
1	Surat Berharga																
2	Pendapatan dari Piutang																
	a. Murabahah																
	b. <i>Istishna'</i>																
	c. <i>Ujrah</i>																
	d. Lainnya																
3	Pendapatan Bagi Hasil																
4	Pendapatan Sewa Ijarah																
5	Pendapatan <i>Salam</i>																
6	Pendapatan dari Penempatan pada Bank Lain																
B	JENIS PENGHIMPUNAN DANA																
1	<i>Non Profit Sharing</i>																
	a. Giro																
	b. Tabungan																
	c. Deposito																
	d. Liabilitas kepada Bank Lain																
	e. Surat Berharga yang Diterbitkan																
	f. Pembiayaan Diterima																
	g. Lainnya																
2	<i>Profit Sharing</i>																
	a. Giro																
	b. Tabungan																
	c. Deposito																
	d. Liabilitas kepada Bank Lain																
	e. Surat Berharga yang Diterbitkan																
	f. Pembiayaan Diterima																
	g. Lainnya																

¹⁾ Jumlah adalah nilai rata-rata dari saldo rata-rata jumlah penyaluran atau penghimpunan dana setiap bulan sampai dengan bulan laporan.

²⁾ Imbalan dalam penyaluran dana adalah jumlah pendapatan margin/bagi hasil/*ujrah* yang diterima dari penyaluran pembiayaan untuk dibagikan pada setiap bulan sampai dengan bulan laporan.
Imbalan dalam penghimpunan dana adalah jumlah bagi hasil yang telah didistribusikan pada setiap bulan sampai dengan bulan laporan.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.E

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

jutaan Rp

No.	URAIAN	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des	Tahun X			Des	Des	
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
1.	Saldo Awal Dana Zakat								
2.	Dana Zakat yang Berasal dari: a. Internal UUS b. Eksternal UUS								
3.	Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat a. Lembaga Amil Zakat b. Badan Amil Zakat								
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat								
5.	Saldo Akhir Dana Zakat								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.F

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

No.	URAIAN	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Tahun X				Des	Des	
			Des X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	Des X+2
1.	Saldo Awal Dana Kebajikan								
2.	Penerimaan Dana Kebajikan a. Infak b. Sedekah c. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif d. Denda e. Penerimaan Non-Halal f. Lainnya								
	Total Penerimaan								
3.	Penggunaan Dana Kebajikan a. Dana Kebajikan Produktif b. Sumbangan c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum								
	Total Penggunaan								
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan								
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.G

**ASUMSI MAKRO DAN MIKRO YANG DIGUNAKAN
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

No.	ASUMSI	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Desember	Tahun X ¹⁾			Des	Des	
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+1	X+2
ASUMSI MAKRO									
1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (%)								
2	Inflasi (%)								
3	Lainnya (dirinci per jenis asumsi) ²⁾								
ASUMSI MIKRO									
1	Pertumbuhan Pembiayaan (%)								
2	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)								
3	Tingkat Imbalan Dana Pihak Ketiga (%)								
4	Tingkat Imbalan Pembiayaan (%)								
5	Lainnya (dirinci per jenis asumsi) ³⁾								

¹⁾ Apabila tidak tersedia asumsi per triwulanan, dapat menggunakan asumsi per tahun.

²⁾ Asumsi makro lainnya, seperti nilai tukar, pertumbuhan nilai ekspor dan impor.

³⁾ Asumsi mikro lainnya, seperti pangsa UUS terhadap industri.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

No.	RASIO DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
			Des	Tahun X			Des	Des	
			X-1	Maret	Juni	Sept	Des	X+ 1	X+2
16	Rasio <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> terhadap Total Aset								
17	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset								
18	Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek								
19	Rasio Deposan Inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga								
20	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (%) ¹⁾								
21	<i>Short Term Mismatch</i> (STM) (%) ²⁾								
22	<i>Short Term Mismatch Plus</i> (STMP) (%) ²⁾								
B	POS-POS TERTENTU LAINNYA								
1	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Mikro terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)								
2	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Kecil terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)								
3	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Menengah terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)								
4	Rasio Total Pembiayaan kepada UMKM terhadap Total Pembiayaan (%)								
5	a. Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran Sumber Daya Manusia (SDM) (%) ³⁾ b. Rasio Sisa Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun Ini yang Digunakan untuk Tahun Berikutnya (%) ⁴⁾								
6	Rasio Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Bank terhadap Modal (%)								

¹⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi BUS dan UUS.

²⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada penjelasan rasio keuangan pokok - Lampiran II.H.

³⁾ Cakupan dana pendidikan dan pelatihan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber dana manusia bank umum.

⁴⁾ Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara kewajiban 5% (lima persen) dari realisasi.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

PENJELASAN RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS-POS TERTENTU LAINNYA

No.	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
RASIO KEUANGAN			
1	<i>Return On Asset</i> (ROA)	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}}$	1) Laba Sebelum Pajak adalah laba tahun berjalan yang disetahunkan. 2) Rata-rata Total Aset adalah rata-rata total aset dalam Laporan Posisi Keuangan sebagaimana tercantum pada Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2	<i>Net Operating Margin</i> (NOM)	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil} - \text{Beban Operasional}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}}$	1) Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban operasional (disetahunkan). 2) Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban bagi hasil meliputi seluruh beban bagi hasil dari penghimpunan dana. 3) Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan). 4) Aset produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun di Transaksi Rekening Administratif (TRA). 5) Rata-rata Aset Produktif. Contoh: Untuk posisi Juni: penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.
3	<i>Net Imbalan</i> (NI)	$\frac{\text{Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil} - (\text{Imbalan dan Bonus})}{\text{Rata-rata Total Aset Produktif}}$	1) Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil - (Imbalan dan Bonus) adalah pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban imbal hasil, imbalan, dan bonus (disetahunkan). 2) Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana, sedangkan beban imbal hasil meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana. 3) Aset produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bagi hasil, imbalan, dan bonus baik di neraca maupun pada TRA. 4) Rata-rata Aset Produktif. Contoh: Untuk posisi Juni: penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.
4	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$	1) Beban Operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan). 2) Total Pendapatan Operasional meliputi pendapatan margin, <i>ujrah</i> , dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya.
5	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Fee Based Income}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$	1) <i>Fee based income</i> meliputi pendapatan komisi/provisi/ <i>fee</i> yang berasal dari kegiatan penyaluran dana, pembiayaan, dan lainnya. 2) Total pendapatan operasional meliputi pendapatan margin, <i>ujrah</i> , dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya
6	Rasio Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	$\frac{\text{Pembiayaan Bagi Hasil}}{\text{Total Pembiayaan}}$	1) Pembiayaan Bagi Hasil adalah seluruh pembiayaan dengan akad bagi hasil baik yang menggunakan metode <i>profit and loss sharing</i> maupun <i>revenue sharing</i> . 2) Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 3) Total pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
7	Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non-Produktif	$\frac{\text{Aset produktif Bermasalah} + \text{Aset Non-Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aset Produktif} + \text{Total Aset Non-Produktif}}$	1) Cakupan komponen dan kualitas aset produktif dan aset non-produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah adalah aset dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 3) Aset Produktif Bermasalah dan aset non-produktif bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca dan transaksi rekening administratif, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 4) Total Aset Produktif dan Total Aset Non-Produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca dan TRA, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).

8	Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	$\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah (diluar TRA)}}{\text{Total Aset Produktif (diluar TRA)}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cakupan komponen dan kualitas aset produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Aset Produktif Bermasalah adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Aset Produktif Bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 3) Total Aset Produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
9	Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	$\frac{\text{CKPN Aset Keuangan}}{\text{Total Aset Produktif (diluar TRA)}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk UUS mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku, yang mencakup CKPN individual dan CKPN kolektif. 2) Perhitungan CKPN mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 3) Cakupan komponen aset produktif mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. Total aset produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca sebelum dikurangi CKPN.
10	Rasio CKPN yang Telah Dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Wajib Dibentuk	$\frac{\text{CKPN atas Aset Produktif Neraca + PPA atas Aset Produktif TRA}}{\text{PPA Wajib Dibentuk atas Aset Pproduktif Neraca dan TRA}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk UUS mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku, yang mencakup CKPN individual dan CKPN kolektif. 2) Perhitungan CKPN mengacu pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. 3) Perhitungan PPA wajib dibentuk atas aset produktif neraca dan TRA mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS.
11	Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>Gross</i>	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 3) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 4) Pembiayaan bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN). 5) Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
12	Rasio NPF <i>Net</i>	$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BUS dan UUS. 2) Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 3) Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. 4) Pembiayaan Bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. 5) CKPN Pembiayaan Bermasalah adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), yang mencakup CKPN pembiayaan secara individual dan kolektif. 6) Total Pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
13	Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Aset Produktif}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 2) Total Aset Produktif adalah pembiayaan, surat berharga, penyertaan, dan tagihan lainnya yang tercantum dalam neraca, baik kepada pihak ketiga bukan bank maupun kepada bank, termasuk kepada Bank Indonesia.
14	Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan	$\frac{\text{Pembiayaan kepada Debitur Inti}}{\text{Total Pembiayaan}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan kepada Debitur Inti meliputi pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank baik debitur individual maupun grup diluar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. bagi UUS yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi pembiayaan kepada 10 debitur atau grup besar; b. bagi UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi pembiayaan kepada 15 debitur atau grup besar; c. bagi UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi pembiayaan kepada 25 debitur atau grup 2) Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

15	Rasio <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> terhadap Total Aset	$\frac{\text{Tagihan Spot dan Forward}}{\text{Total Aset}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> meliputi seluruh tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca). 2) Total Aset meliputi total aset yang tercatat pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
16	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	$\frac{\text{Aset Likuid Primer + Aset Likuid Sekunder}}{\text{Total Aset}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aset Likuid Primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga kategori tersedia untuk dijual/<i>Available for Sale</i> (AFS) atau <i>trading</i>, dan seluruh surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu 1 tahun atau kurang. 2) Aset Likuid Sekunder meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dengan kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 (lima) tahun; b. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>Hold to Maturity</i> (HTM) dan memiliki sisa jatuh waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan c. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu > 5 (lima) tahun, dengan nilai <i>haircut</i> 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pasar. 3) Total aset meliputi total aset yang tercatat pada Laporan Posisi Keuangan (neraca).
17	Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek	$\frac{\text{Aset Likuid Primer + Aset Likuid Sekunder}}{\text{Pendanaan Jangka Pendek (Short Term Funding)}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aset Likuid Primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga kategori tersedia untuk dijual/<i>Available for Sale</i> (AFS) atau <i>trading</i>, dan seluruh surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS yang memiliki kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu 1 tahun atau kurang. 2) Aset Likuid Sekunder meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dengan kualitas lancar, diperdagangkan pada pasar aktif, dan memiliki sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun; b. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori HTM dan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun; c. surat berharga pemerintah (<i>government sukuk</i>) kategori <i>trading</i> dan AFS dan memiliki sisa jangka waktu > 5 tahun, dengan nilai <i>haircut</i> 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pasar. 3) Pendanaan Jangka Pendek meliputi giro, tabungan, dan deposito dengan sisa jangka waktu ≤ 1 tahun.
18	Rasio Deposan Inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga (DPK)	$\frac{\text{Deposan Inti}}{\text{DPK}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Deposan Inti mencakup 10, 25, atau 50 deposan terbesar dari total simpanan, berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. bagi UUS yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp 1 triliun, meliputi 10 deposan; b. bagi UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp 10 triliun meliputi 25 deposan; c. bagi UUS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp 10 triliun meliputi 50 deposan. 2) Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi giro, tabungan, dan deposito.
19	<i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR)	$\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{DPK}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kualitas Aset BUS dan UUS. 2) Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. 3) DPK mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank).
20	<i>Short Term Mismatch</i> (STM)	$\frac{\text{Aset Jangka Pendek}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aset Jangka Pendek adalah aset likuid kurang dari 3 bulan selain kas, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai Laporan Berkala Bank Umum. 2) Liabilitas Jangka Pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai Laporan Berkala Bank Umum.
21	<i>Short Term Mismatch Plus</i> (STMP)	$\frac{\text{Aset Jangka Pendek + Kas + Secondary Reserves}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aset Jangka Pendek adalah aset likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI, dan SBSN dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai Laporan Berkala Bank Umum. 2) Liabilitas Jangka Pendek adalah kewajiban likuid kurang dari 3 bulan dalam laporan <i>maturity profile</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai Laporan Berkala Bank Umum.

Lampiran II.I

**RENCANA PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

KELOMPOK	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
Dana Simpanan <i>Wadiah</i> A. Giro 1. Rupiah 2. Valuta Asing Total Giro ¹⁾ B. Tabungan 1. Rupiah 2. Valuta Asing Total Tabungan ²⁾						
Total Dana Simpanan <i>Wadiah</i>						
Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i> A. Giro 1. Rupiah 2. Valuta Asing Total Giro ³⁾ B. Tabungan 1. Rupiah 2. Valuta Asing Total Tabungan ⁴⁾ C. Deposito 1. Rupiah - 1 bulan - 3 bulan - 6 bulan - ≥ 12 bulan 2. Valuta Asing - 1 bulan - 3 bulan - 6 bulan - ≥ 12 bulan Total Deposito ⁵⁾						
Total Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i>						
TOTAL PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA A. Rupiah B. Valuta Asing						
TOTAL DEPOSAN INTI ⁶⁾						
% DEPOSAN INTI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA						

¹⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Simpanan *Wadiah* - Giro pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.1a.

²⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Simpanan *Wadiah* - Tabungan pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.1b.

³⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi *Non Profit Sharing*- Giro pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.2a.

⁴⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi *Non Profit Sharing* - Tabungan pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.2b.

⁵⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Dana Investasi *Non Profit Sharing*- Deposito pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No.2c.

⁶⁾ Deposan inti adalah nasabah dana pihak ketiga terbesar secara kumulatif untuk jenis giro, tabungan, dan deposito yang dibedakan berdasarkan jumlah total aset Bank sebagai berikut:

- total aset ≤ Rp 1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) nasabah dana pihak ketiga terbesar;
- Rp 1 triliun < total aset ≤ Rp 10 triliun, meliputi 25 (dua puluh lima) nasabah dana pihak ketiga terbesar; atau
- total aset > Rp 10 triliun, meliputi 50 (lima puluh) nasabah dana pihak ketiga terbesar.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.J

**RENCANA PENERBITAN SURAT BERHARGA
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

JENIS	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
A. RUPIAH						
1. Surat Berharga Pasar Uang Syariah						
a. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)						
b. Promes						
c. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah						
d. Surat Berharga Pasar Uang Lainnya						
2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah						
a. Sukuk Subordinasi						
b. Sukuk Lainnya						
c. Surat Berharga Pasar Modal Lainnya						
Total Surat Berharga - Rupiah						
B. VALUTA ASING						
1. Surat Berharga Pasar Uang Syariah						
a. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)						
b. Promes						
c. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah						
d. Surat Berharga Pasar Uang Lainnya						
2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah						
a. Sukuk Subordinasi						
b. Sukuk Lainnya						
c. Surat Berharga Pasar Modal Lainnya						
Total Surat Berharga - Valuta Asing						
TOTAL SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN¹⁾						

¹⁾ Total pada baris ini harus sesuai dengan total Surat Berharga yang Diterbitkan pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Liabilitas dan Ekuitas No. 6.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.K

RENCANA PENDANAAN LAINNYA¹⁾
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

jutaan Rp

JENIS PENDANAAN LAINNYA ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
JUMLAH						

¹⁾ Jenis pendanaan lainnya merupakan pendanaan selain dalam bentuk penghimpunan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan penerbitan surat berharga.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.L

**RENCANA PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT ¹⁾
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

NAMA PIHAK TERKAIT	JENIS PENYEDIAAN DANA ²⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
			Des X-1	Tahun X			
				Maret	Juni	Sept	Des
JUMLAH							
% PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT TERHADAP MODAL							

¹⁾ Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

²⁾ Jenis Penyediaan dana dikelompokkan menjadi:

a. Pembiayaan

b. Penyediaan dana lainnya, yang mencakup fasilitas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), selain Pembiayaan.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.M.1

RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR INTI ¹⁾
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

jutaan Rp

NAMA PEMINJAM/KELOMPOK PEMINJAM	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
JUMLAH						
% PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR INTI TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN						

¹⁾ Debitur inti adalah nasabah peminjam terbesar secara individu atau kelompok di luar pihak terkait yang dibedakan berdasarkan jumlah total aset UUS sebagai berikut :

- a. total aset ≤ Rp 1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) nasabah peminjam terbesar;
- b. Rp 1 triliun < total aset ≤ Rp 10 triliun, meliputi 15 (lima belas) nasabah peminjam terbesar; atau
- c. total aset > Rp 10 triliun, meliputi 25 (dua puluh lima) nasabah peminjam terbesar.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.M.2

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

KEGIATAN USAHA TERTENTU ¹⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
1 Properti						
2 Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)						
3 Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya						
4 Pembiayaan Kendaraan Bermotor						
5 Pembiayaan Perumahan						
6 Kartu Pembiayaan (<i>sharia card</i>)						
7 Perusahaan Sekuritas						
8 Perusahaan Pembiayaan						
9 Industri Pariwisata						
10 Lainnya (dirinci sesuai dengan kegiatan usaha yang menjadi fokus sebagian besar pemberian pembiayaan utama UUS, seperti : Perkapalan, Telekomunikasi Pembangunan Jalan Tol, Pensiunan, Pegawai)						
JUMLAH						

¹⁾ Jenis kegiatan usaha tertentu yang tercantum pada lampiran ini hanya diisi untuk jenis usaha yang relevan sebagai fokus pemberian pembiayaan UUS dan UUS dapat menambahkan jenis kegiatan usaha lain yang sesuai dengan jenis usaha yang menjadi fokus pada masing-masing UUS. Untuk jenis kegiatan usaha yang tidak menjadi fokus pemberian pembiayaan UUS, cukup diisi TS (tidak signifikan).

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.M.3.a

RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI¹⁾
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

jutaan Rp

SEKTOR EKONOMI	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
A RUPIAH						
1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalian						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
19 Bukan Lapangan Usaha						
20 Lainnya						
JUMLAH RUPIAH						
B VALUTA ASING						
1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan						
2 Perikanan						
3 Pertambangan dan Penggalian						
4 Industri Pengolahan						
5 Listrik, Gas, dan Air						
6 Konstruksi						
7 Perdagangan Besar dan Eceran						
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10 Perantara Keuangan						
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
13 Jasa Pendidikan						
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya						
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
19 Bukan Lapangan Usaha						
20 Lainnya						
JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI ²⁾						

¹⁾ Penjelasan mengenai kategori sektor ekonomi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan BUS dan UUS (LSMK).

²⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 8, 9,10, dan 13.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.M.3.b

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

JENIS PENGGUNAAN	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
RUPIAH A. MODAL KERJA 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Investasi C. KONSUMSI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Konsumsi JUMLAH RUPIAH						
VALUTA ASING A. MODAL KERJA 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Investasi C. KONSUMSI 1. Ritel 2. Korporasi 3. Lainnya Total Pembiayaan Konsumsi JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN¹⁾						

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 8, 9,10, dan 13.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.M.3.c

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PROVINSI
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

PROVINSI	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
1 Nanggroe Aceh Darussalam						
2 Sumatera Utara						
3 Sumatera Barat						
4 Bengkulu						
5 Riau						
6 Kepulauan Riau						
7 Jambi						
8 Sumatera Selatan						
9 Lampung						
10 Kepulauan Bangka Belitung						
11 DKI Jakarta						
12 Jawa Barat						
13 Banten						
14 Jawa Tengah						
15 DI Yogyakarta						
16 Jawa Timur						
17 Kalimantan Barat						
18 Kalimantan Tengah						
19 Kalimantan Selatan						
20 Kalimantan Timur						
21 Kalimantan Utara						
22 Bali						
23 Nusa Tenggara Barat						
24 Nusa Tenggara Timur						
25 Sulawesi Barat						
26 Sulawesi Utara						
27 Sulawesi Tengah						
28 Sulawesi Selatan						
29 Sulawesi Tenggara						
30 Gorontalo						
31 Maluku						
32 Maluku Utara						
33 Papua Barat						
34 Papua						
35						
JUMLAH ¹⁾						

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 8, 9, 10 dan 13.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.M.3.d

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS AKAD
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

JENIS AKAD	Aktual Sept X-1	Des X-1	Proyeksi			
			Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
RUPIAH A. Piutang 1. Murabahah 2. <i>Istishna'</i> 3. <i>Qardh</i> 4. Piutang Sewa B. Pembiayaan 1. <i>Mudharabah</i> 2. Musyarakah 3. Lainnya C. Ijarah D. <i>Salam</i> JUMLAH RUPIAH						
VALUTA ASING A. Piutang 1. Murabahah 2. <i>Istishna'</i> 3. <i>Qardh</i> 4. Piutang Sewa B. Pembiayaan 1. <i>Mudharabah</i> 2. Musyarakah 3. Lainnya C. Ijarah D. <i>Salam</i> JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS AKAD¹⁾						

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total pembiayaan pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 8, 9,10, dan 13.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.M.4.a

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

SEKTOR EKONOMI	Aktual Sept X-1	Proyeksi			
		Des X-1	Tahun X		
			Maret	Juni	Sept
A USAHA MIKRO					
1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan					
2 Perikanan					
3 Pertambangan dan Penggalian					
4 Industri Pengolahan					
5 Listrik, Gas, dan Air					
6 Konstruksi					
7 Perdagangan Besar dan Eceran					
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi					
10 Perantara Keuangan					
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan					
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib					
13 Jasa Pendidikan					
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya					
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga					
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya					
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya					
19 Bukan Lapangan Usaha					
20 Lainnya					
JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA MIKRO					
B USAHA KECIL					
1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan					
2 Perikanan					
3 Pertambangan dan Penggalian					
4 Industri Pengolahan					
5 Listrik, Gas, dan Air					
6 Konstruksi					
7 Perdagangan Besar dan Eceran					
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi					
10 Perantara Keuangan					
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan					
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib					
13 Jasa Pendidikan					
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya					
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga					
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya					
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya					
19 Bukan Lapangan Usaha					
20 Lainnya					
JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA KECIL					
C USAHA MENENGAH					
1 Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan					
2 Perikanan					
3 Pertambangan dan Penggalian					
4 Industri Pengolahan					
5 Listrik, Gas, dan Air					
6 Konstruksi					
7 Perdagangan Besar dan Eceran					
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi					
10 Perantara Keuangan					
11 <i>Real Estate</i> , Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan					
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib					
13 Jasa Pendidikan					
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya					
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga					
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya					
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya					
19 Bukan Lapangan Usaha					
20 Lainnya					
JUMLAH PEMBIAYAAN USAHA MENENGAH					
JUMLAH PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI (A + B + C)					

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.M.4.b

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

JENIS PENGGUNAAN	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
RUPIAH A. MODAL KERJA 1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah Total Pembiayaan Investasi						
JUMLAH RUPIAH						
VALUTA ASING A. MODAL KERJA 1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah Total Pembiayaan Modal Kerja B. INVESTASI 1. Mikro 2. Kecil 3. Menengah Total Pembiayaan Investasi						
JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN						

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.M.4.c

**RENCANA PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
BERDASARKAN PROVINSI (LOKASI PROYEK/DEBITUR)
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

PROVINSI	Aktual Sept X-1	Des X-1	Proyeksi			
			Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
A USAHA MIKRO						
1 Nanggroe Aceh Darussalam						
2 Sumatera Utara						
3 Sumatera Barat						
4 Bengkulu						
5 Riau						
6 Kepulauan Riau						
7 Jambi						
8 Sumatera Selatan						
9 Lampung						
10 Kepulauan Bangka Belitung						
11 DKI Jakarta						
12 Jawa Barat						
13 Banten						
14 Jawa Tengah						
15 DI Yogyakarta						
16 Jawa Timur						
17 Kalimantan Barat						
18 Kalimantan Tengah						
19 Kalimantan Selatan						
20 Kalimantan Timur						
21 Kalimantan Utara						
22 Bali						
23 Nusa Tenggara Barat						
24 Nusa Tenggara Timur						
25 Sulawesi Barat						
26 Sulawesi Utara						
27 Sulawesi Tengah						
28 Sulawesi Selatan						
29 Sulawesi Tenggara						
30 Gorontalo						
31 Maluku						
32 Maluku Utara						
33 Papua Barat						
34 Papua						
35						
JUMLAH						
B USAHA KECIL						
1 Nanggroe Aceh Darussalam						
2 Sumatera Utara						
3 Sumatera Barat						
4 Bengkulu						
5 Riau						
6 Kepulauan Riau						
7 Jambi						
8 Sumatera Selatan						
9 Lampung						
10 Kepulauan Bangka Belitung						
11 DKI Jakarta						
12 Jawa Barat						
13 Banten						
14 Jawa Tengah						
15 DI Yogyakarta						
16 Jawa Timur						
17 Kalimantan Barat						
18 Kalimantan Tengah						
19 Kalimantan Selatan						
20 Kalimantan Timur						
21 Kalimantan Utara						
22 Bali						
23 Nusa Tenggara Barat						
24 Nusa Tenggara Timur						
25 Sulawesi Barat						
26 Sulawesi Utara						
27 Sulawesi Tengah						
28 Sulawesi Selatan						
29 Sulawesi Tenggara						
30 Gorontalo						
31 Maluku						
32 Maluku Utara						
33 Papua Barat						
34 Papua						
35						
JUMLAH						

PROVINSI	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
C USAHA MENENGAH						
1 Nanggroe Aceh Darussalam						
2 Sumatera Utara						
3 Sumatera Barat						
4 Bengkulu						
5 Riau						
6 Kepulauan Riau						
7 Jambi						
8 Sumatera Selatan						
9 Lampung						
10 Kepulauan Bangka Belitung						
11 DKI Jakarta						
12 Jawa Barat						
13 Banten						
14 Jawa Tengah						
15 DI Yogyakarta						
16 Jawa Timur						
17 Kalimantan Barat						
18 Kalimantan Tengah						
19 Kalimantan Selatan						
20 Kalimantan Timur						
21 Kalimantan Utara						
22 Bali						
23 Nusa Tenggara Barat						
24 Nusa Tenggara Timur						
25 Sulawesi Barat						
26 Sulawesi Utara						
27 Sulawesi Tengah						
28 Sulawesi Selatan						
29 Sulawesi Tenggara						
30 Gorontalo						
31 Maluku						
32 Maluku Utara						
33 Papua Barat						
34 Papua						
35						
JUMLAH						
JUMLAH PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN PROVINSI						

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.N

**RENCANA PENANAMAN DANA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

jutaan Rp

JENIS	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
A. RUPIAH						
<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perbendaharaan Negara Syariah b. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank c. Promes d. Wesel <ul style="list-style-type: none"> 1) Wesel Ekspor 2) Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) 3) Wesel Lainnya e. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah f. Lainnya 2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Reksadana Syariah b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) <ul style="list-style-type: none"> 1) Sukuk Negara 2) Sukuk Ritel c. Sukuk Subordinasi d. Sukuk Lainnya e. Efek Beragun Aset f. Lainnya 						
JUMLAH RUPIAH						
B. VALUTA ASING						
<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Berharga Pasar Keuangan Syariah <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Perbendaharaan Negara Syariah b. Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank c. Promes d. Wesel <ul style="list-style-type: none"> 1) Wesel Ekspor 2) Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) 3) Wesel Lainnya e. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah f. Lainnya 2. Surat Berharga Pasar Modal Syariah <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Reksadana Syariah b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) <ul style="list-style-type: none"> 1) Sukuk Negara 2) Sukuk Ritel c. Sukuk Subordinasi d. Sukuk Lainnya e. Efek Beragun Aset f. Lainnya 						
JUMLAH VALUTA ASING						
JUMLAH PENANAMAN DANA DALAM BENTUK SURAT BERHARGA ¹⁾						

¹⁾ Jumlah pada baris ini harus sama dengan total surat berharga yang dimiliki pada Lampiran II.A - Proyeksi Neraca - Aset No. 5.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.O

RENCANA PENANAMAN DANA LAINNYA
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

jutaan Rp

JENIS PENANAMAN DANA LAINNYA	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
		Des X-1	Tahun X			
			Maret	Juni	Sept	Des
JUMLAH						

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.P

RENCANA PERUBAHAN MODAL
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

jutaan Rp

	Aktual Sept X-1	Proyeksi						
		Des X-1	Tahun X				Des X+1	Des X+2
			Maret	Juni	Sept	Des		
A. Rekening Antar Kantor Aset								
B. Rekening Antar Kantor Liabilitas								
C. Dana Bersih UUS (B-A)								

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

X+1 adalah tahun kedua posisi Rencana Bisnis

X+2 adalah tahun ketiga posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.Q.1

KONDISI DAN RENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA¹⁾
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

No.	POSISI JABATAN ²⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi				
			Des X-1	Tahun X			
				Maret	Juni	Sept	Des
1							
2							
3							
4							
5							

¹⁾ Diisi dengan angka jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).

²⁾ Posisi Jabatan diisi sesuai dengan struktur organisasi UUS mulai pejabat satu tingkat di bawah direksi sampai dengan pegawai terendah, termasuk staf ahli seperti tenaga kontrak profesional, staf khusus direksi (di luar *outsourcing*).

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.Q.2

**RENCANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

NO.	JENIS PENDIDIKAN/PELATIHAN	JENIS JABATAN	JUMLAH	WAKTU	PENYELENGGARA	RENCANA BIAYA
1						
2						
3						
4						
5						

Lampiran II.R

**RENCANA PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING
DAN PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING)
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

A. Tenaga Kerja Asing (TKA)

NO.	BIDANG TUGAS DAN POSISI		JUMLAH	NAMA TKA	JANGKA WAKTU	NAMA TENAGA PENDAMPING	RENCANA PROGRAM ALIH PENGETAHUAN
	POSISI JABATAN	LINGKUP					
1	Komisaris						
2	Direktur						
3	Pejabat Eksekutif						
4	Tenaga Ahli/ Konsultan						
5	Jabatan lainnya ¹⁾						
Alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak/belum menggunakan tenaga kerja Indonesia :							
a.							
b.							
dst.							

¹⁾ Jika ada, sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tenaga Alih Daya (Outsourcing)²⁾

NO.	BIDANG KERJA PENUGASAN ³⁾	Aktual Sept X-1	Proyeksi			
			Des X-1	Tahun X		
				Maret	Juni	Sept
1						
2						
3						
4						
dst.						

²⁾ Diisi dengan angka jumlah Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*).

³⁾ Bidang Kerja Penugasan diisi antara lain mengacu pada Lampiran I.B Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Keterangan:

X-1 adalah tahun penyusunan laporan

X adalah tahun pertama posisi Rencana Bisnis

Lampiran II.S

**RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU 1)
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

NO.	JENIS	RENCANA WAKTU PENERBITAN ATAU PELAKSANAAN	TUJUAN/MANFAAT		KETERKAITAN PRODUK ATAU AKTIVITAS BARU DENGAN STRATEGI UUS ²⁾	DESKRIPSI UMUM ²⁾	RISIKO YANG MUNGKIN TIMBUL ²⁾	MITIGASI RISIKO ATAS PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU
			BAGI UUS	BAGI NASABAH				
A	PRODUK							
1								
2								
dst.								
B	AKTIVITAS							
1								
2								
dst.								

¹⁾ Hanya produk dan/atau aktivitas baru yang belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh UUS.

²⁾ Penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Keterangan:

Bagi UUS yang ingin menyelenggarakan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), rencana penyelenggaraan Laku Pandai juga disertai dengan informasi dan penjelasan mengenai jumlah dan jenis agen yang ditargetkan per tahun selama 3 (tiga) tahun pertama penyelenggaraan dan untuk kerjasama pada tahun pertama disertai dengan rincian lokasi kabupaten/kota.

Lampiran II.T

**RENCANA PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK**

NO.	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN ¹⁾	PERKIRAAN INVESTASI/BIAYA	LOKASI ²⁾	KETERANGAN ³⁾
A PEMBUKAAN						
1	Kantor Cabang 1) dst.					
2	Kantor Cabang Pembantu 1) dst.					
3	Kantor Kas 1) dst.					
4	Kantor Fungsional 1) dst.					
5	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst.					
6	Layanan Syariah 1) dst.					
7	Kantor di Luar Negeri 1) dst.					
B PERUBAHAN STATUS						
1	Kantor Cabang 1) dst.					
2	Kantor Cabang Pembantu 1) dst.					
3	Kantor Kas 1) dst.					
4	Kantor Fungsional 1) dst.					
5	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst.					
6	Layanan Syariah 1) dst.					
7	Kantor di Luar Negeri 1) dst.					

NO.	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN ¹⁾	PERKIRAAN INVESTASI/BIAYA	LOKASI ²⁾	KETERANGAN ³⁾
C	PEMINDAHAN ALAMAT					
1	Kantor Cabang 1) dst.					
2	Kantor Cabang Pembantu 1) dst.					
3	Kantor Kas 1) dst.					
4	Kantor Fungsional 1) dst.					
5	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst.					
6	Layanan Syariah 1) dst.					
7	Kantor di Luar Negeri 1) dst.					
D	PENUTUPAN					
1	Kantor Cabang 1) dst.					
2	Kantor Cabang Pembantu 1) dst.					
3	Kantor Kas 1) dst.					
4	Kantor Fungsional 1) dst.					
5	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst.					
6	Layanan Syariah 1) dst.					
7	Kantor di Luar Negeri 1) dst.					

¹⁾ Diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.

²⁾ Untuk lokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit mencantumkan nama kota administrasi atau kabupaten administrasi. Untuk lokasi di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama kabupaten/kota.

³⁾ Keterangan yang lebih rinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Keterangan:

Formulir ini dilengkapi dengan perhitungan ketersediaan alokasi modal inti dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembukaan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Lampiran II.U.1

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS¹⁾
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK
PERIODE :

- a. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus, prioritas pencapaian Rencana Bisnis, dan perbandingan antara Rencana Bisnis dengan realisasinya.²⁾
- b. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
- c. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.

¹⁾ Jumlah halaman/ukuran dalam lampiran ini tidak mengikat sehingga UUS dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan dalam lembaran yang terpisah.
Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

²⁾ Perbandingan Rencana Bisnis dengan realisasi selain mencakup Lampiran II.U.2, UUS perlu juga menjelaskan besaran realisasi yang terkait dengan proyeksi keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan rencana permodalan yang belum tercakup dalam lampiran tersebut.

Lampiran II.U.2

LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN POKOK DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA

UNIT USAHA SYARIAH PT BANK

PERIODE :.....¹⁾

NO.	RASIO DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA	TARGET	REALISASI	DEVIASI	KETERANGAN
A.	RASIO KEUANGAN POKOK				
1	<i>Return on Asset (ROA) (%)²⁾</i>				
2	<i>Net Operating Margin (NOM) (%)²⁾</i>				
3	<i>Net Imbalan (NI)²⁾</i>				
4	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)				
5	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional				
6	Rasio Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan				
7	Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non-Produktif				
8	Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif				
9	Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif				
10	Rasio CKPN yang Telah Dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Wajib Dibentuk				
11	Rasio <i>Non Performing Financing (NPF)²⁾</i> - <i>Gross</i> - <i>Netto</i>				
12	Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif				
13	Rasio Debitur Inti terhadap Total Pembiayaan				
14	Rasio Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) terhadap Total Pembiayaan				
15	Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang Belum Ditarik <i>Committed</i> - Rupiah - Valuta Asing <i>Uncommitted</i> - Rupiah - Valuta Asing				

NO.	RASIO DAN POS - POS TERTENTU LAINNYA	TARGET	REALISASI	DEVIASI	KETERANGAN
16	Rasio <i>Spot</i> dan <i>Forward</i> terhadap Total Aset				
17	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset				
18	Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek				
19	Rasio Deposan Inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga				
20	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (%) ²⁾				
21	<i>Short Term Mismatch</i> (STM) (%) ³⁾				
22	<i>Short Term Mismatch Plus</i> (STMP) (%) ³⁾				
B.	POS-POS TERTENTU LAINNYA				
1	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Mikro terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)				
2	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Kecil terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)				
3	Rasio Total Pembiayaan kepada Usaha Menengah terhadap Total Pembiayaan kepada UMKM (%)				
4	Rasio Total Pembiayaan kepada UMKM terhadap Total Pembiayaan (%)				
5	a. Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran Sumber Daya Manusia (%) ⁴⁾				
	b. Rasio Sisa Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Tahun Ini yang Digunakan untuk Tahun Berikutnya (%) ⁵⁾				
6	Rasio Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Bank terhadap Modal (%)				

¹⁾ Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

²⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi BUS dan UUS.

³⁾ Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada penjelasan rasio keuangan pokok - Lampiran II.H.

⁴⁾ Cakupan dana pendidikan dan pelatihan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum.

⁵⁾ Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara kewajiban 5% (lima persen) dari realisasi.

Lampiran II.U.3

LAPORAN PENGEMBANGAN DAN/ATAU REALISASI PERUBAHAN JARINGAN KANTOR
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK
PERIODE :.....¹⁾

NO.	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	TANGGAL REALISASI	LOKASI ²⁾	KETERANGAN ³⁾
A PEMBUKAAN					
1	Kantor Cabang 1) dst.				
2	Kantor Cabang Pembantu 1) dst.				
3	Kantor Kas 1) dst.				
4	Kantor Fungsional 1) dst.				
5	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst.				
6	Layanan Syariah 1) dst.				
7	Kantor di Luar Negeri 1) dst.				
B PERUBAHAN STATUS					
1	Kantor Cabang 1) dst.				
2	Kantor Cabang Pembantu 1) dst.				
3	Kantor Kas 1) dst.				
4	Kantor Fungsional 1) dst.				
5	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst.				
6	Layanan Syariah 1) dst.				
7	Kantor di Luar Negeri 1) dst.				

NO	NAMA KANTOR	KANTOR INDUK	TANGGAL REALISASI	LOKASI ²⁾	KETERANGAN ³⁾
C	PEMINDAHAN ALAMAT				
1	Kantor Cabang 1) dst.				
2	Kantor Cabang Pembantu 1) dst.				
3	Kantor Kas 1) dst.				
4	Kantor Fungsional 1) dst.				
5	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst.				
6	Layanan Syariah 1) dst.				
7	Kantor di Luar Negeri 1) dst.				
D	PENUTUPAN				
1	Kantor Cabang 1) dst.				
2	Kantor Cabang Pembantu 1) dst.				
3	Kantor Kas 1) dst.				
4	Kantor Fungsional 1) dst.				
5	Kegiatan Pelayanan Kas 1) dst.				
6	Layanan Syariah 1) dst.				
7	Kantor di Luar Negeri 1) dst.				

¹⁾ Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

²⁾ Diisi dengan mencantumkan alamat lengkap termasuk nomor telepon dan nomor faksimili.

³⁾ Keterangan yang lebih rinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

Lampiran II.U.4

**LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING, HASIL PELAKSANAAN
KEWAJIBAN ALIH PENGETAHUAN, DAN TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING)
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK
PERIODE :.....¹⁾**

A. Tenaga Kerja Asing (TKA)

NO.	NAMA TKA	BIDANG TUGAS	POSISI/JABATAN		NAMA PENDAMPING	HASIL EVALUASI TERHADAP PENDAMPING	PENDIDIKAN / PELATIHAN KEPADA PENDAMPING	LEMBAGA PELAKSANA	KETERANGAN
			TKA	PENDAMPING					
1					1. 2.				
2					1. 2.				
dst.					dst.				

B. Hasil Pelaksanaan Kewajiban Alih Pengetahuan²⁾

NO.	NAMA TKA	WAKTU PELATIHAN / PENGAJARAN	LOKASI PELATIHAN / PENGAJARAN	JUMLAH PESERTA	JANGKA WAKTU	MATERI / TOPIK
1		1 2				
2		1 2				
dst.		dst.				

C. Tenaga Alih Daya (Outsourcing)

NO.	POSISI JABATAN	BIDANG KERJA PENUGASAN ³⁾	JUMLAH	JANGKA WAKTU
1				
2				
dst.				

¹⁾ Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

²⁾ Disertai lampiran foto - foto kegiatan pelatihan

³⁾ Bidang Kerja Penugasan diisi antara lain mengacu pada Lampiran I.B Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Lampiran II.U.5

LAPORAN REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK
PERIODE :.....¹⁾

NO.	JENIS PENDIDIKAN/PELATIHAN	JENIS JABATAN	JUMLAH	WAKTU REALISASI	LEMBAGA PENYELENGGARA	REALISASI BIAYA	KETERANGAN
1							
2							
3							
4							
dst.							

¹⁾ Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

Lampiran II.U.6

LAPORAN REALISASI LINKAGE PROGRAM
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK
PERIODE :.....¹⁾

NO.	PIHAK PERANTARA	KUALITAS	<i>jutaan Rp</i> JUMLAH		
			REKENING	NOMINAL	
A. CHANNELLING					
	1	1. Lancar			
		2. Dalam Perhatian Khusus			
		3. Kurang Lancar			
		4. Diragukan			
		5. Macet			
	2	1. Lancar			
		2. Dalam Perhatian Khusus			
		3. Kurang Lancar			
		4. Diragukan			
		5. Macet			
	dst.	1. Lancar			
		2. Dalam Perhatian Khusus			
		3. Kurang Lancar			
		4. Diragukan			
		5. Macet			
JUMLAH	1. Lancar				
	2. Dalam Perhatian Khusus				
	3. Kurang Lancar				
	4. Diragukan				
	5. Macet				
B. EXECUTING					
	1				
	2				
	3				
	dst.				
	JUMLAH	1. Lancar			
		2. Dalam Perhatian Khusus			
3. Kurang Lancar					
4. Diragukan					
5. Macet					
JUMLAH REALISASI LINKAGE PROGRAM (A + B)					

¹⁾ Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

Lampiran II.V

LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS1)
UNIT USAHA SYARIAH PT BANK
PERIODE :.....¹⁾

- a. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah²⁾
- b. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan, rentabilitas, tata kelola yang baik, dan profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.²⁾
- c. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya perbaikan kinerja UUS, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja UUS sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat penurunan kinerja.²⁾

¹⁾ Jumlah halaman/ukuran dalam lampiran ini tidak mengikat sehingga UUS dapat menguraikan lebih rinci atau menambahkan dalam lembaran yang terpisah.
Periode diisi dengan bulan laporan realisasi.

²⁾ Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf c dapat dilengkapi dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional UUS.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

HERU KRISTIYANA

ttd

Yuliana